

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

KAMPUNG MENKAPAN
KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU



proforest

daemeter

**PROFIL DESA PEDULI GAMBUT
KAMPUNG MENGKAPAN
KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK**



**PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI, PARTISIPASI DAN
KEMITRAAN
LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL
KAMPUNG MENGKAPAN, KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU
TAHUN 2020**



TIM PENYUSUN :

1. RAHMAIDI AZANI (FASILITATOR DESA PEDULI GAMBUT)
2. KHAIRUL (ENUMERATOR)
3. ASBOR. D (ENUMERATOR)
4. DESI MARTIKA VITASARI (TIM APPROVAL)

LEMBAR PERSETUJUAN KAMPUNG

Kami yang bertandatangan di bawah ini, selaku Penghulu dan Kerani Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menyatakan keabsahan **Buku Profil Desa Peduli Gambut 2020 – Kampung Mengkapan** yang disusun pada Oktober-Desember 2020 dengan partisipasi masyarakat Kampung Mengkapan bersama Tim penyusun Profil Desa Peduli Gambut Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia sebagai Buku Profil Kampung Mengkapan yang akan dipergunakan untuk **kegiatan pembangunan dan perbaikan ekosistem gambut wilayah Kampung Mengkapan.**

Mengkapan, Desember 2020

Penghulu

Kerani

Muhir

Azwar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim Penyusun panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahnya, sehingga penyusunan “Profil Desa Peduli Gambut (DPG) Kampung Mengkapan 2020” dapat terselesaikan. Profil DPG ini merupakan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan pada Oktober hingga Desember 2020 dengan melibatkan masyarakat Kampung Mengkapan dalam pengambilan data spasial maupun sosial.

Profil Desa Peduli Gambut ini memaparkan tentang kondisi Kampung Mengkapan tahun 2020 terkait ekosistem lahan gambut, beserta peluang dan tantangan dalam melakukan restorasi. Besar harapan kami agar profil ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada berbagai pihak, sekaligus sebagai bahan dasar dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai pengelolaan tata guna lahan yang berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi serta peningkatan ekonomi masyarakat disekitar ekosistem gambut.

Tim Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mempercayakan kami dalam menyelesaikan Profil DPG Kampung Mengkapan 2020. Kami ucapkan terima kasih terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kampung Mengkapan, Pemerintahan Kampung Mengkapan serta berbagai pihak yang terlibat atas dukungan waktu, tenaga dan pemikiran selama proses pengambilan data di lapangan. Selain itu juga kami haturkan terima kasih kepada Dinamisator BRG Riau, Proforest, Daemeter dan Epistema yang telah dengan sabar memeriksa dan memberi masukan dalam penyusunan profil DPG ini. Semoga Profil DPG Kampung Mengkapan ini dapat menjadi penunjang dalam segala aktifitas terkait pengembangan potensi lahan gambut dan sumber daya di Mengkapan.

Mengkapan, Desember 2020

Tim Penyusun Profil DPG
Kampung Mengkapan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	10
Bab I Pendahuluan	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan.....	12
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	12
1.4. Struktur Laporan.....	13
Bab II Gambaran Umum Lokasi.....	15
2.1. Lokasi Kampung.....	15
2.2. Orbitasi	15
2.3. Batas dan Luas Wilayah	16
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial	16
2.4.1. Fasilitas Transportasi	17
2.4.2. Fasilitas Pemerintahan.....	19
2.4.3. Fasilitas Peribadatan.....	20
2.4.4. Fasilitas Pendidikan.....	21
2.4.5. Fasilitas Kesehatan	21
2.4.6. Fasilitas Keamanan	22
2.4.7. Fasilitas Perekonomian.....	22
2.4.8. Fasilitas Lainnya	24
Bab III Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut.....	25
3.1. Topografi.....	25
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah	26
3.2.1. Geomorfologi.....	26
3.2.2. Jenis Tanah	26
3.3. Iklim dan Cuaca	28
3.4. Keanekaragaman Hayati	31
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut.....	33
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut	35
Bab IV Kependudukan	39
4.1. Data Umum Penduduk	39
4.1.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia produktif	39
4.1.2. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan	39
4.1.3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	40
4.1.3. Jumlah penduduk berdasarkan berdasarkan profesi/pekerjaan	40
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	41
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk.....	42

Bab V Pendidikan dan Kesehatan	44
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan	44
5.1.1. Tenaga Pendidikan.....	44
5.1.2. Tenaga Kesehatan	44
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	44
5.2.1. Fasilitas Pendidikan.....	44
5.2.1 Fasilitas Kesehatan	46
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan	46
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap	47
Bab VI Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat	48
6.1. Sejarah Kampung.....	48
6.2. Etnis, Bahasa, Agama	48
6.3 Legenda.....	48
6.4. Kesenian Tradisional	48
6.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	49
Bab VII Pemerintahan dan Kepemimpinan	50
7.1. Pembentukan Pemerintahan	50
7.2. Struktur Pemerintahan Kampung Mengkapan 2020-2026.....	51
7.3. Kepemimpinan Tradisional.....	53
7.4. Aktor Berpengaruh	53
7.5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan	53
7.6. Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa.....	54
Bab VIII Kelembagaan Sosial.....	55
8.1. Organisasi Sosial Formal.....	55
8.2. Organisasi Sosial Nonformal	56
8.3. Jejaring Sosial.....	56
Bab IX Perekonomian	58
9.1. Pendapatan dan Belanja Kampung.....	58
9.2. Aset Kampung.....	58
9.3. Tingkat Pendapatan Masyarakat.....	65
9.4. Industri dan Pengolahan	65
9.5. Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	66
Bab X Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	68
10.1. Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam.....	68
10.2. Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam.....	69
10.3. Penguasaan Parit/Kanal di Lahan Gambut	72
10.4. Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut).....	72
10.5. Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	72
Bab XI Proyek Pembangunan Kampung	73
11.1. Program Pembangunan Kampung	73

11.2. Program Kerjasama dengan Pihak Lain.....	73
Bab XII Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	74
Bab XIII Penutup	76
13.1. Kesimpulan.....	76
13.2. Saran.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Orbitasi Kampung Mengkapan	16
Tabel 2.	Batas wilayah Kampung Mengkapan	16
Tabel 3.	Fasilitas Transportasi Kampung Mengkapan	17
Tabel 4.	Fasilitas Pemerintahan Kampung Mengkapan	19
Tabel 5.	Fasilitas Peribadatan Kampung Mengkapan.....	20
Tabel 6.	Fasilitas Pendidikan Kampung Mengkapan	21
Tabel 7.	Fasilitas Kesehatan Kampung Mengkapan	22
Tabel 8.	Fasilitas Keamanan Kampung Mengkapan	22
Tabel 9.	Kelas kemiringan lahan Kampung Mengkapan.....	25
Tabel 10.	Kelas Ketinggian (mdpl) Kampung Mengkapan	26
Tabel 11.	Kedalaman Gambut Kampung Mengkapan	28
Tabel 12.	Kalender Musim.....	30
Tabel 13.	Cuaca rata-rata bulanan di Kampung Mengkapan.....	30
Tabel 14.	Keanekaragaman Hayati dan Kecenderungan Perubahan Keankeragaman Fauna dan Flora di Kampung Mengkapan.....	31
Tabel 15.	Keanekaragaman Hayati dan Kecenderungan Perubahan Keankeragaman Fauna di Kampung Mengkapan	32
Tabel 16.	Jumlah Hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020	35
Tabel 17.	Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020	39
Tabel 18.	Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan usia produktif	39
Tabel 19.	Jumlah Kepala Keluarga Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan tingkat kesejahteraan.....	39
Tabel 20.	Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidik	40
Tabel 21.	Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan profesi/pekerjaan	40
Tabel 22.	Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2014 - 2020.....	42
Tabel 23.	Jumlah Tenaga Pendidikan di Kampung Mengkapan.....	44
Tabel 24.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kampung Mengkapan	44
Tabel 25.	Jumlah peserta didik di Kampung Mengkapan berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2019.....	47
Tabel 26.	Jumlah masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2019	47
Tabel 27.	Sejarah Pemerintahan Kampung Sebelum Pemekaran.....	50
Tabel 28.	Sejarah Pemerintahan Kampung Setelah Pemekaran.....	50
Tabel 29.	Tupoksi Perangkat Kampung Mengkapan	51
Tabel 29.	Organisasi sosial formal di Kampung Mengkapan.....	55
Tabel 28.	Organisasi Sosial Nonformal di Kampung Mengkapan	56
Tabel 31.	Rekapitulasi Pendapatan Kampung Mengkapan tahun 2019-2020	58
Tabel 32.	Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Kampung Mengkapan tahun 2019-2020	58
Tabel 31.	Aset Kampung Mengkapan.....	59
Tabel 34.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut di Kampung Mengkapan....	67
Tabel 35.	Pemanfaatan Lahan Kampung Mengkapan.....	68
Tabel 36.	Peta Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan Berdasarkan Hasil Pemetaan Partisipatif	69
Tabel 37.	Luasan Kawasan Hutan di Kampung Mengkapan	70
Tabel 38.	Hasil Telaah Sengkarut Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan.....	71

Tabel 40.	Persepsi Masyarakat Kampung Mengkapan Terhadap Restorasi Gambut.....	74
Tabel 40.	Rekapitulasi Perkiraan Biaya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Tahun 2020 - 2026.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Indikatif Wilayah Administrasi Kampung Mengkapan.....	15
Gambar 2.	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kampung Mengkapan.....	17
Gambar 3.	A) Salah satu pelabuhan rakyat yang ada di Kampung Mengkapan dan B)Proses bongkar muat Nenas yang akan dikirim ke Batam di salah satu pelabuhan tradisional	18
Gambar 4.	Dokumentasi kondisi beberapa jalan di Kampung Mengkapan	19
Gambar 5.	Fasilitas Pemerintahan Kampung Mengkapan	20
Gambar 6.	Fasilitas Peribadatan Kampung Mengkapan	21
Gambar 7.	Fasilitas Keamanan Kampung Mengkapan	22
Gambar 8.	Pasar Tradisional di Kampung Mengkapan.....	23
Gambar 9.	Unit Usaha BUMKam Mengkapan.....	23
Gambar 10.	Ekowisata Mangrove Kampung Mengkapan.....	24
Gambar 11.	Peta Kelerengkan Kampung Mengkapan	25
Gambar 12.	Peta Morfologi Kampung Mengkapan.....	26
Gambar 13.	Tanah Liat Pantai	27
Gambar 14.	Tanah Kilang Manis.....	27
Gambar 15.	Tanah Gambut	27
Gambar 16.	Peta Lahan Gambut Kampung Mengkapan	28
Gambar 17.	Fauna yang sudah tidak dapat ditemukan di Kampung Mengkapan	33
Gambar 18.	Peta Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Kampung Mengkapan	34
Gambar 19.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampung Mengkapan	34
Gambar 22.	Grafik Jumlah Hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020	35
Gambar 21.	Peta Sebaran Hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020	36
Gambar 22.	Penampakan Areal Bekas Kebakaran pada Citra Satelit Sentinel.....	36
Gambar 23.	Peta Areal Bekas Kebakaran tahun 2020 di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020	37
Gambar 24.	Penampakan Areal Bekas Kebakaran di Lapangan.....	37
Gambar 25.	Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Kampung Mengkapan	38
Gambar 26.	Diagram garis jumlah penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2014 – 2020	42
Gambar 27.	Fasilitas Pendidikan Kampung Mengkapan	45
Gambar 28.	Fasilitas Kesehatan Kampung Mengkapan	46
Gambar 29.	Bagan Struktur Pemerintahan Kampung Mengkapan	51
Gambar 30.	Diagram Venn pengaruh dan kedekatan kelembagaan di Kampung Mengkapan .	56
Gambar 31.	Kilang Sagu Mini di Kampung Mengkapan	66
Gambar 32.	Peta Pemanfaatan Lahan Kampung Mengkapan tahun 2019	68
Gambar 33.	Peta Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan Berdasarkan Hasil Pemetaan Partisipatif.....	69
Gambar 34.	Peta Kawasan Hutan di Kampung Mengkapan	70
Gambar 35.	Peta Sengkarut Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan	71

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kampung Mengkapan secara geografis berada pada daerah pesisir pantai timur pulau Sumatera dan Laut Selat Lalang dengan posisi koordinat pada Koordinat $100^{\circ} 45'' - 100^{\circ} 52''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'' - 0^{\circ} 32''$ Lintang Utara. Secara administratif, Kampung Mengkapan berada pada wilayah administrasi Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kampung Mengkapan berada pada jalur penghubung antar pulau, salah satu yang terdekat adalah Pulau Padang yang secara administrasi berada pada wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak hanya penghubung dengan Kepulauan Meranti tetapi juga dengan Kabupaten Bengkalis hingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, Pulau Batam dan Tanjung Pinang.

Wilayah daratan Kampung Mengkapan merupakan dataran rendah yang sebagian besarnya adalah lahan gambut, sebagian kecil lainnya lahan dengan tanah mineral yang dimanfaatkan sebagai pemukiman masyarakat yang terpusat berada di pesisir Laut Selat Lalang. Pemanfaatan lahan gambut oleh sebagian besar masyarakat Kampung Mengkapan dulunya adalah komoditas tanaman sagu. Selain juga memanfaatkan kayu hutan alam yang ada di lahan gambut untuk kebutuhan pembangunan rumah serta berburu hewan-hewan buruan seperti rusa dan kancil. Seiring perkembangan zaman masyarakat mulai mengenal tanaman sawit, satu persatu masyarakat mulai menjadikan lahan gambut sebagai lahan perkebunan sawit hingga saat ini. Hingga sekarang ini dapat dikatakan lebih dari 80% masyarakat mengandalkan perkebunan sawit sebagai pendapatan utama perekonomian mereka.

Kondisi ekosistem gambut di Kampung Mengkapan saat ini secara keseluruhan sudah mengalami alih fungsi yang didominasi oleh tanaman akasia dan kelapa sawit. Ini karena sebagian besar wilayah kampung dikuasai oleh perizinan HTI dan HGU kelapa sawit. Pengelolaan lahan gambut untuk kepentingan HTI dan sawit dengan menggunakan sistem kanalisasi menyebabkan lahan gambut mudah terbakar. Ini menyebabkan areal gambut di wilayah Kampung Mengkapan mengalami beberapa kali kebakaran.

Pada awal tahun 2020 terjadi kebakaran di beberapa titik pada wilayah Kampung Mengkapan dengan luas diperkirakan mencapai 300 hektare. Kebakaran menghanguskan lahan perkebunan masyarakat. Akibat dari kebakaran tersebut, sejumlah masyarakat terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu. Sementara itu, kerugian material yang diakibatkan kebakaran tersebut adalah sejumlah lahan perkebunan masyarakat terbakar.

Melihat bahwa isu kebakaran yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian dan lingkungan serta telah menjadi isu internasional sehingga desakan oleh berbagai pihak untuk menjaga dan memulihkan ekosistem gambut perlu dilakukan, selain itu bahwa sebagian besar wilayah Kampung Mengkapan merupakan lahan gambut maka tentunya perlu menjadi perhatian.

Pentingnya pertimbangan aspek keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan dalam kebijakan pengelolaan kawasan maka harus didukung dengan data-data yang mumpuni. Mengingat penataan ruang dalam pengelolaan kawasan yang melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab serta aturan-aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan baik

ditingkat pusat maupun daerah hingga ditingkat kampung maka menjadi perlu penyalarsan dan pembagian wilayah berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan serta aturan-aturannya agar diketahui oleh pemerintah kampung.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa peduli gambut melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di desa/kampung yang berada pada lahan gambut. Dengan demikian, profil desa peduli gambut merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di tingkat desa/kampung.

1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2020. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat primer yaitu metode diskusi kelompok terfokus (*FGD/Focus Group Discussion*), wawancara mendalam terhadap informan-informan kunci, wawancara semi-terstruktur terhadap aparatur pemerintah kampung, dan pengamatan secara langsung di lapangan. Sementara itu, pengumpulan data yang bersifat sekunder dilakukan dengan merujuk pada dokumen/situs resmi pemerintahan, studi literatur dari berbagai sumber seperti buku atau karya ilmiah, dan sumber pemberitaan dari media massa. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

- 1) Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Kampung Mengkapan yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur. Dalam pembuatan profil kampung, wawancara telah dilakukan kepada 30 orang yang terdiri dari aparatur pemerintahan Kampung Mengkapan, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), Kepala Dusun (Kadus), perwakilan dari organisasi sosial masyarakat, dan masyarakat umum dengan latar belakang spesifik terkait topik pembahasan tertentu.
- 2) Diskusi terpimpin (*FGD*) melibatkan masyarakat Kampung Mengkapan yang telah dipilih berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di kampung, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hasil *FGD* tersebut dicatat dan didokumentasikan. *FGD* dalam pemetaan partisipatif dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali:
 - a. *FGD* ke-1: Pertemuan kampung untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan pengambilan data awal (peta sketsa, kalender musim, bagan kecenderungan perubahan, bagan mata pencaharian, diagram venn, transek, bagan pemanfaatan dan penguasaan ruang kampung). *FGD* ke-1 dalam pembuatan profil ini melibatkan 20 orang (15 laki-laki dan 5 perempuan) yang terdiri dari aparatuhan kampung, perwakilan dari kelembagaan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.
 - b. *FGD* ke-2: Pertemuan kampung untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf

profil kampung gambut bersama warga. FGD ke-2 dalam pembuatan profil ini melibatkan 30 orang (15 laki-laki dan 5 perempuan) yang terdiri dari aparaturnya kampung, perwakilan dari kelembagaan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat.

- c. FGD ke-3: Pertemuan kampung untuk persetujuan dan penyerahan peta kampung dan profil Desa Peduli Gambut.
- 3) Pengamatan langsung dilakukan di Kampung Mengkapan dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
- 4) Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data tambahan yang digunakan dalam penulisan profil desa. Sumber studi literatur dalam penulisan profil desa ini antara lain RPJM Desa, data kependudukan pemerintah desa, dan lainnya.

1.4. Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan, memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi, menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III: Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut, memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV: Kependudukan, memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V: Kesehatan dan Pendidikan, mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebaakaran gambut.

BAB VI: Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat, memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII: Pemerintah dan Kepemimpinan, menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat

pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan lokal/tradisional, serta aktor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sektor, baik itu ekonomi, politik, aktor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII: Kelembagaan Sosial, menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX: Perekonomian Desa/Komunitas, memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X: Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam, menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI: Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Ada, penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII: Persepsi Terhadap Restorasi Gambut, memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Lampiran-lampiran, (peta, foto, dan lain-lain).

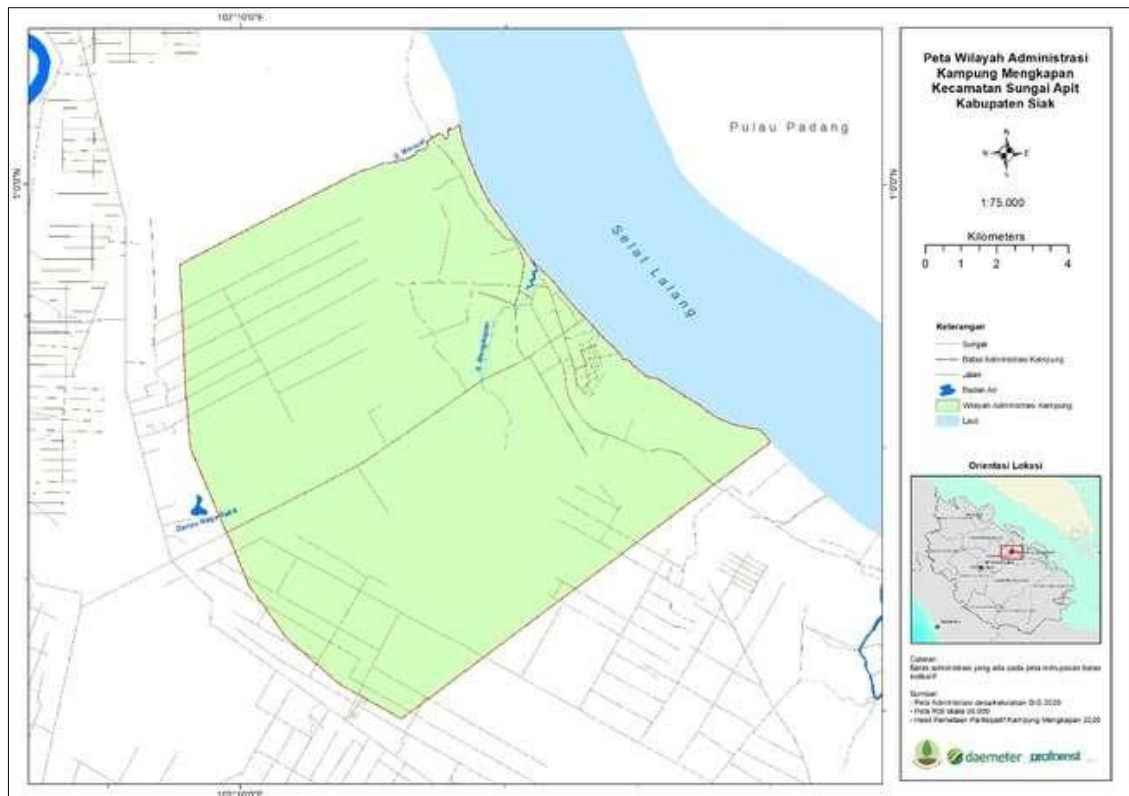
Bab II Gambaran Umum Lokasi

2.1. Lokasi Kampung

Kampung Mengkapan secara administratif berada pada wilayah administrasi Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Secara astronomis terletak pada posisi Koordinat $100^{\circ} 45'' - 100^{\circ} 52''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'' - 0^{\circ} 32''$ Lintang Utara. Secara geografis berada pada daerah pesisir pantai timur pulau Sumatera dan Laut Selat Lalang, dimana Selat Lalang merupakan perairan laut yang berada antara Pulau Sumatera dan Pulau Padang. Kampung Mengkapan berada di wilayah yang cukup strategis, karena merupakan jalur transit bagi orang-orang yang ingin menuju Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis hingga Provinsi Kepulauan Riau.

Peta wilayah administrasi Kampung Mengkapan hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat Kampung Mengkapan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Peta Indikatif Wilayah Administrasi Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

2.2. Orbitasi

Akses menuju Kampung Mengkapan dari Pekanbaru (Ibukota Provinsi Riau) dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor melalui jalan lintas Sumatera hingga jalan lintas Marelan - Simpang Beringin dan jalan Baru Bakal hingga simpang jalan lintas Perawang - Siak. Melalui jalan lintas Perawang - Siak hingga jalan jalan Zamrud - Siak dan jalan Raya Lintas Timur Sumatera menuju Pelabuhan Tanjung Buton. Transportasi umum yang dapat digunakan dari Pekanbaru yakni *travel* dengan tarif berkisar antara Rp100.000 - Rp120.000 dengan rute Pekanbaru - Pelabuhan Tanjung Buton yang berada di Kampung Mengkapan. Perkiraan akses jarak dan waktu tempuh Kampung Mengkapan menuju pusat pemerintahan ibu kota

kecamatan, ibukota kabupaten dan ibukota provinsi diajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Orbitasi Kampung Mengkapan

No	Uraian	Keterangan
1	Ke Ibu kota Kecamatan Sungai Apit	
	Jarak	±20 KM
	Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor	±40 Menit
	Tidak tersedia transportasi umum	
2	Ke Ibu kota Kabupaten Siak	
	Jarak	±40 KM
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	±1 Jam
	Tidak tersedia transportasi umum	
3	Ke Ibu kota Provinsi (Pekanbaru)	
	Jarak	±140 KM
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	±3 Jam
	Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	Travel/sewa mobil

Sumber: Pengamatan langsung di lapangan

2.3. Batas dan Luas Wilayah

Berdasarkan data pada dokumen RPJMKam 2020-2026 luas wilayah 11.327 hektare, sementara berdasarkan data spasial wilayah administrasi desa hasil pemutakhiran data wilayah administrasi desa/kelurahan yang dirilis oleh Badan Informasi Geospasial pada bulan Maret 2020, menunjukkan luas Kampung Mengkapan adalah 15.826,5 hektare. Sedangkan berdasarkan hasil pemetaan spasial partisipatif adalah ±15.175,8 hektare.

Batas wilayah kampung di sebelah timur adalah Laut Selat Lalang, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Bunsur, sebelah barat dengan Kampung Dosan, Kecamatan Pusako dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sungai Rawa. Batas-batas wilayah administrasi Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Batas wilayah Kampung Mengkapan

No	Batas	Wilayah Berbatasan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kampung Bunsur	Kecamatan Sungai Apit
2	Sebelah Timur	Laut Selat Lalang	Kabupaten Kepulauan Meranti
3	Sebelah Selatan	Kampung Dosan	Kecamatan Pusako
4	Sebelah Barat	Kampung Sungai Rawa	Kecamatan Sungai Apit

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

Informasi mengenai wilayah administrasi Kampung Mengkapan ini masih indikatif, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dari pemerintah dan tokoh-tokoh kunci yang memahami sejarah dan riwayat kewilayahan Kampung Mengkapan dengan metode pemetaan partisipatif. Hasil pemetaan partisipatif ini belum dilakukan konfirmasi dengan kampung-kampung sempadan, kecamatan dan kabupaten. Namun setidaknya peta yang dihasilkan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penetapan wilayahnya sendiri. Sehingga diharapkan peta ini dapat dijadikan acuan dalam penetapan wilayah defenitif Kampung Mengkapan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak kedepannya sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku.

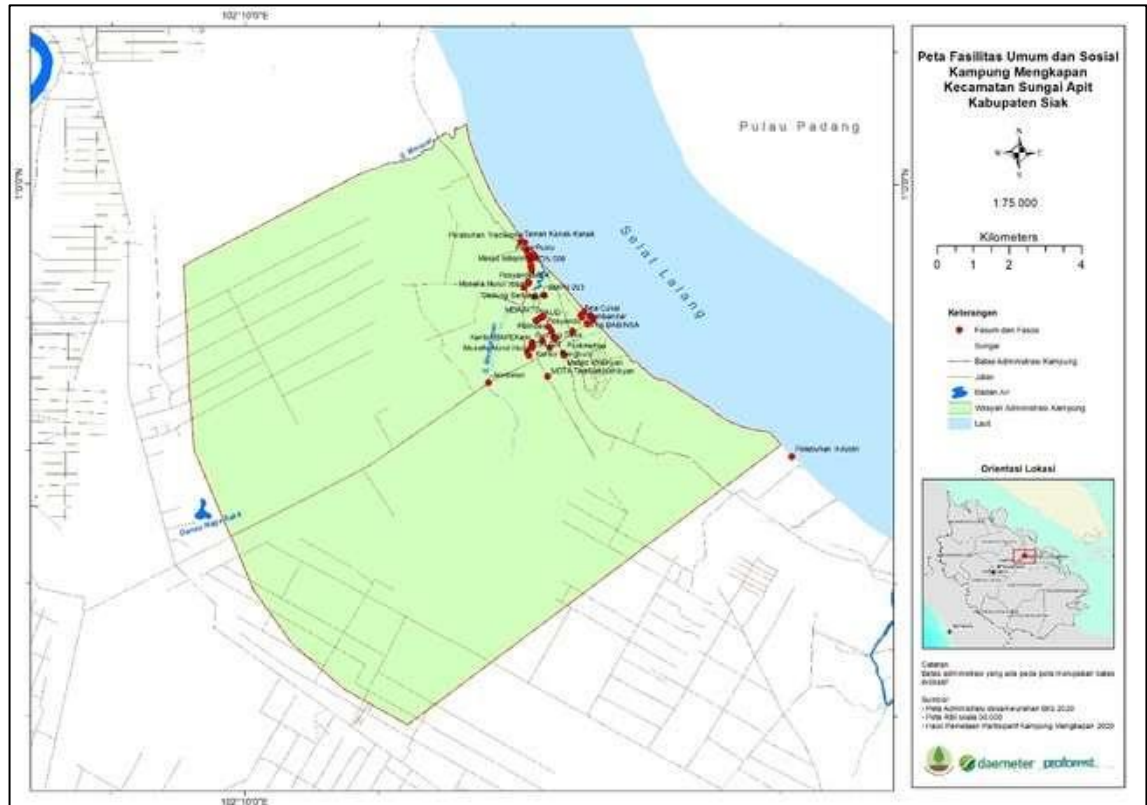
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum dan sosial adalah fasilitas atau sarana dan prasarana disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama

masyarakat umum. Fasilitas umum dan sosial umumnya berupa sarana dan prasarana transportasi, fasilitas pemerintahan, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan lain sebagainya.

Berikut ini disajikan data informasi fasilitas umum dan sosial yang terdapat di Kampung Mengkapan.

Gambar 2. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kampung Mengkapan



2.4.1. Fasilitas Transportasi

Di Kampung Mengkapan beroperasi sebuah pelabuhan penumpang yaitu Pelabuhan Tanjung Buton. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang digunakan orang-orang untuk berpergian dengan menggunakan kapal penumpang. Pelabuhan ini melayani rute dengan tujuan ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Pelalawan hingga ke provinsi Kepulauan Riau.

Selain itu juga terdapat beberapa pelabuhan tradisional yang dibangun dan kepemilikannya oleh perorangan yang difungsikan sebagai bongkar muat barang skala kecil dan penyeberangan jarak pendek di beberapa lokasi di Pulau Padang.

Terdapat beberapa ruas jalan yang dibangun oleh desa, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Tabel 3. Fasilitas Transportasi Kampung Mengkapan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
1	Pelabuhan Tanjung Buton	1	Baik	-	APBN
2	Pelabuhan Rakyat/Tradisional	4	Baik	-	Perorangan
3	Jalan Lintas Timur Sumatera	11,5 Km	Baik	-	APBN

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
4	Jalan Lintas Sei Apit	7 Km	Baik	-	APBD
5	Jalan Lintas Penyengat	6 Km	Baik	-	APBD
6	Jembatan Sungai Mengkapan	2	Baik	-	APBN dan APBD
7	Jembatan Sungai Menuous	1	Baik	-	APBD
8	Gang Abadi	-	-	Rusak	-
9	Gang Rambai	-	-	Rusak	-
10	Gang Famili	-	-	Rusak	-
11	Gang Nurul Iman	-	-	Rusak	-
12	Jalan Sawit Lanjutan	-	-	Rusak	-
13	Jalan Pulai Tiga	-	-	Rusak	-
14	Jalan Kumpai I	-	-	Rusak	-
15	Jalan Tambak Udang	-	-	Rusak	-
16	Jalan Binjai II	-	-	Rusak	-
17	Jalan Pelajar	-	-	Rusak	-
18	Jalan Binjai I	-	-	Rusak	-
19	Jalan Berembang	-	-	Rusak	-
20	Jalan Baru Menuous	-	-	Rusak	-
21	Jalan Binakarya	-	-	Rusak	-
22	Jalan Duku	-	-	Rusak	-
23	Jalan SMP	-	-	Rusak	-
24	Jalan Proyek BOB	-	-	Rusak	-
25	Jalan Duku	-	-	Rusak	-
26	Jalan Sukajadi	-	-	Rusak	-
27	Jalan Jasa Bakti	-	-	Rusak	-

Gambar 3. A) Salah satu pelabuhan rakyat yang ada di Kampung Mengkapan dan B) Proses bongkar muat Nenas yang akan dikirim ke Batam di salah satu pelabuhan tradisional



Sumber: Observasi Lapangan

Gambar 4. Dokumentasi kondisi beberapa jalan di Kampung Mengkapan



Sumber: Observasi Lapangan

2.4.2. Fasilitas Pemerintahan

Kampung Mengkapan memiliki beberapa fasilitas yang dibangun untuk memperlancar kegiatan pemerintahan kampung. Adapun jumlah, jenis dan kondisi fasilitas pemerintahan yang terdapat di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Fasilitas Pemerintahan Kampung Mengkapan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
1	Kantor Desa	1	1		APBD
2	Kantor BAPEKam	1	1		APBD
3	Gedung Serbaguna	1	1		APBD
4	Sekretarian BUMKam	1	1		APBD
5	Gudang Kampung	1	1		APBD

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Secara umum kondisi semua fasilitas pemerintahan yang ada di Kampung Mengkapan masih dalam kondisi baik dan berfungsi. Hanya saja Sekretariat BAPEKam tidak terawat karena memang dalam beberapa tahun belakangan tidak difungsikan, akan tetapi untuk kedepannya telah direncanakan oleh pemerintahan kampung untuk di fungsikan kembali.

Gambar 5. Fasilitas Pemerintahan Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

2.4.3. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kampung Mengkapan berjumlah 9 unit dan semuanya adalah fasilitas peribadatan umat muslim yang terdiri dari 6 musalla dan 3 masjid. Keseluruhan fasilitas tersebut dalam kondisi baik dan berfungsi, hanya 1 masjid yang belum berfungsi karena masih dalam tahap pembangunan yaitu masjid Al-Khairiyah. Pembangunan masjid ini didanai oleh PT. BSP-Pertamina Hulu. Rincian jumlah dan jenis fasilitas peribadatan yang terdapat di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Fasilitas Peribadatan Kampung Mengkapan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
1	Masjid	3	2	-	BOB-PT. BSP-Pertamina Hulu, APBD dan Swadaya
2	Musala	6	6	-	APBD dan Swadaya

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Gambar 6. Fasilitas Peribadatan Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

2.4.4. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kampung Mengkapan dari Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama. Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, anak-anak Kampung Mengkapan melanjutkan ke fasilitas pendidikan SMA yang ada di kampung tetangga yaitu Kampung Sungai Rawa, Kampung Lalang dan Ibukota kecamatan Sungai Apit. Rincian jumlah dan jenis fasilitas pendidikan yang terdapat di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Fasilitas Pendidikan Kampung Mengkapan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
1	PAUD	1	1	-	APBD
2	TK	2	2		APBD
3	TPQ	2	2		APBD
4	SD	2	2	-	APBD
5	MDTA	3	3		Swadaya dan APBD
6	SMP	1	1	-	APBD
7	MTS	1	1		Swadaya dan APBD

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

2.4.5. Fasilitas Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, Kampung Mengkapan memiliki 1 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu (PUSTU), 2 Posyandu dan 1 Pondok Bersalin. Rincian jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang terdapat di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Fasilitas Kesehatan Kampung Mengkapan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
1	PUSTU	1	1	-	APBD
2	Posyandu	2	2	-	APBD
3	Pondok Bersalin (POLINDES)	1	1	-	APBD
4	Puskesmas	1	1	-	APBD

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

2.4.6. Fasilitas Keamanan

Untuk fasilitas keamanan Kampung Mengkapan memiliki 1 unit Pos Babinkamtibmas, 1 unit Pos Kamling dan beberapa Pos lainnya. Rincian jumlah dan jenis fasilitas keamanan yang terdapat di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Fasilitas Keamanan Kampung Mengkapan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi		Pembiayaan
			Baik	Rusak	
1	Pos Bhabinkamtibmas	1	1	-	APBD
2	Poskamling	1	1	-	Swadaya
3	Pos DIT Pol Air	1	1	-	APBN
4	Babinsa	1	1		Dana Desa
5	Pos Pengamat TNI AL	1	1		APBN

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Gambar 7. Fasilitas Keamanan Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

2.4.7. Fasilitas Perekonomian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kampung Mengkapan

mengandalkan sebuah pasar tradisional yang pembangunannya dilakukan secara swadaya. Pasar ini beroperasi setiap hari Rabu malam yang menjual berbagai macam barang dagangan seperti halnya pasar tradisional pada umumnya. Para pedagang yang berjualan dipasar tradisional ini sebagian besar berasal dari daerah lain, para pedagang ini datang ke Kampung Mengkapan hanya untuk berdagang saja dan tidak menetap.

Gambar 8. Pasar Tradisional di Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Untuk kebutuhan alat-alat tulis dan peralatan kantor, tersedia di sebuah toko yang merupakan unit usaha BUMKam. Toko ini adalah salah satu toko yang menyediakan kebutuhan alat-alat tulis, foto copy dan peralatan kantor yang terlengkap di Mengkapan.

Gambar 9. Unit Usaha BUMKam Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

2.4.8. Fasilitas Lainnya

Di Kampung Mengkapan terdapat objek wisata Kawasan Hutan Mangrove yang dibentuk pada tahun 2004 dan baru populer sejak tahun 2013. Objek Ekowisata Mangrove ini diresmikan langsung oleh Bupati Siak Syamsuar dan salah satu Ekowisata Mangrove yang cukup populer di Kabupaten Siak. Namun beberapa waktu belakangan pengunjung Ekowisata Mangrove Mengkapan ini mulai berkurang akibat dampak dari pandemi covid-19.

Gambar 10. Ekowisata Mangrove Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Bab III Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

3.1. Topografi

Melalui pengamatan langsung di lapangan, secara umum wilayah Kampung Mengkapan datar atau landai, tidak terdapat wilayah yang berbukit atau lereng. Lereng dibagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-45 %), dan sangat curam (≥ 45 %). Dari hasil pengolahan data Kelerengan Provinsi Riau dalam RTRWP Riau 2018-2038, wilayah Kampung Mengkapan berdasarkan kelas kemiringan lahan disajikan pada tabel berikut ini.

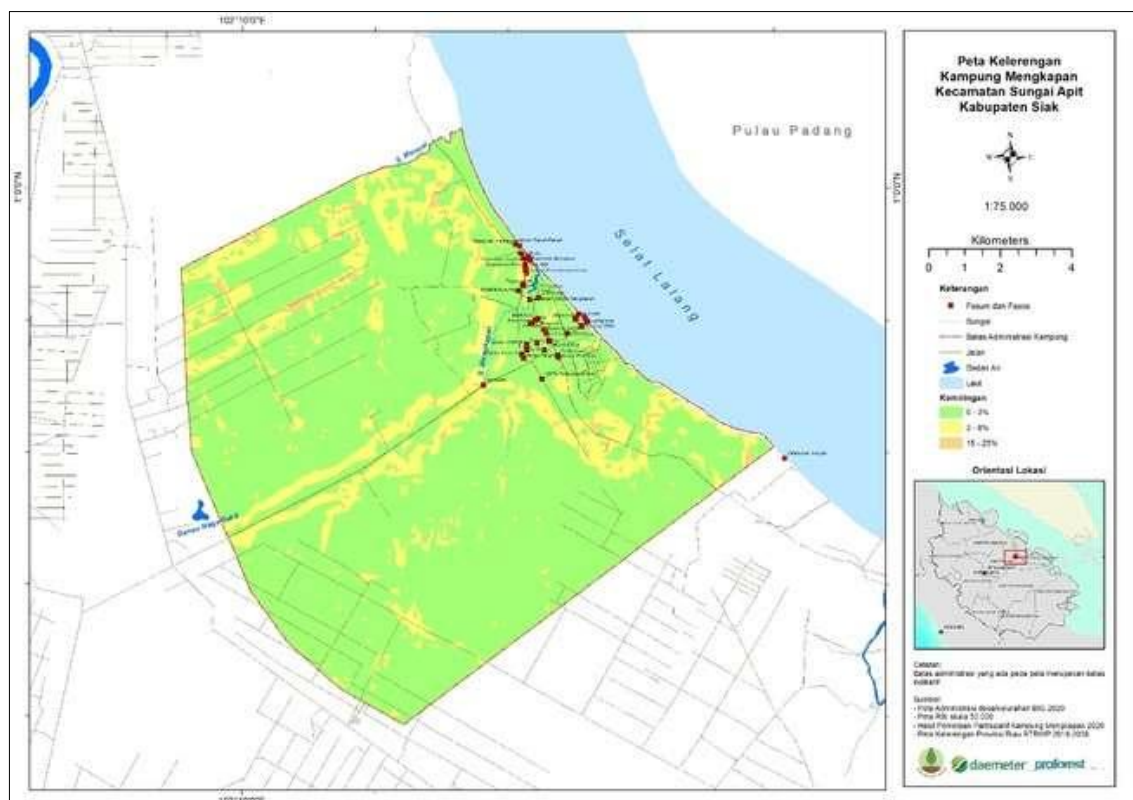
Tabel 9. Kelas kemiringan lahan Kampung Mengkapan

No	Kemiringan	Luas (Ha)
1	0 - 3%	12.417,0
2	3 - 8%	2.534,6
3	15 - 25%	176,9

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel data kelas kemiringan lahan Kampung Mengkapan di atas dapat dilihat bahwa wilayah Kampung Mengkapan didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0-3% dan 0-8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Kampung Mengkapan berada pada kelas kelerengan datar. Peta kelerengan Kampung Mengkapan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 11. Peta Kelerengan Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah

3.2.1. Geomorfologi

Secara morfologi, wilayah daratan terbagi menjadi dua kelas yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah adalah dataran yang berada pada ketinggian di bawah 200 mdpl sedangkan dataran tinggi adalah dataran yang berada pada ketinggian di atas 200 mdpl. Dari hasil pengolahan data Ketinggian (mdpl) Provinsi Riau dalam RTRWP Riau 2018-2038, wilayah Kampung Mengkapan berdasarkan ketinggian mdpl disajikan pada tabel berikut ini.

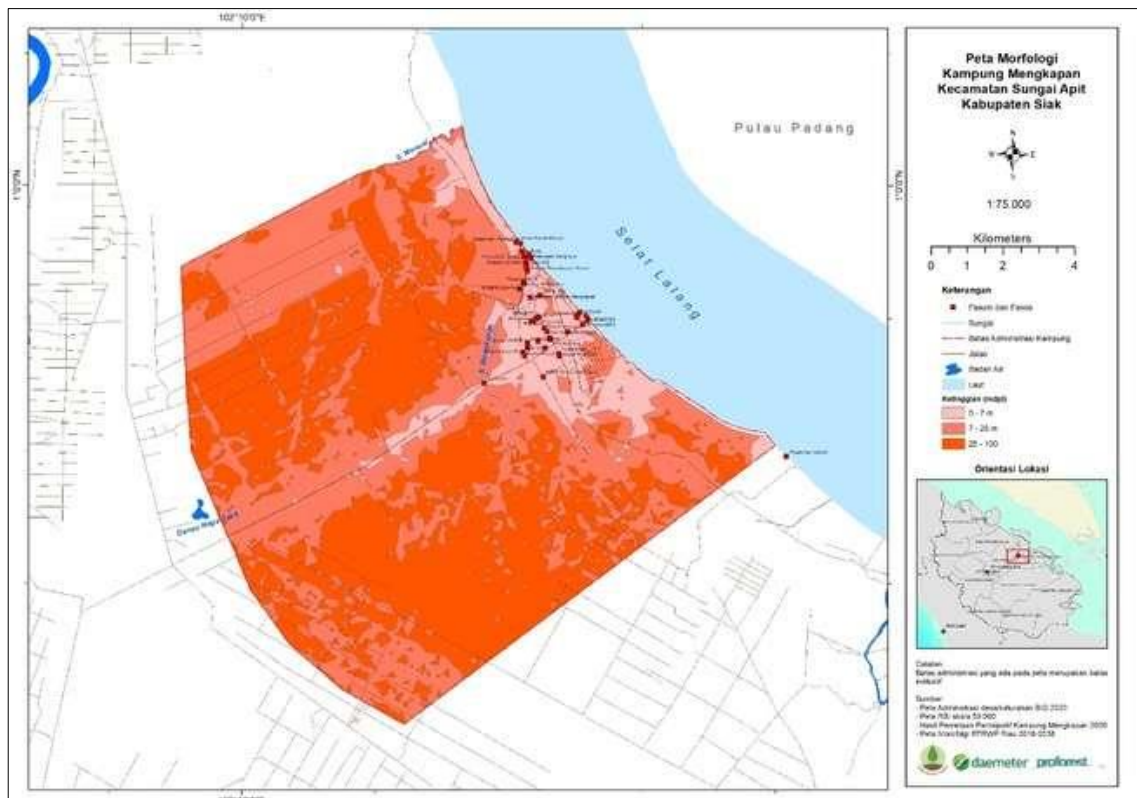
Tabel 10. Kelas Ketinggian (mdpl) Kampung Mengkapan

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)
1	0 - 7 m	1.407,9
2	7 - 25 m	6.335,8
3	25 - 100 m	7.373,0

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa wilayah Kampung Mengkapan berada pada Ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut (mdpl) maka secara morfologi wilayah Kampung Mengkapan merupakan daratan yang termasuk dalam dataran rendah. Peta morfologi wilayah Kampung Mengkapan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 12. Peta Morfologi Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.2.2. Jenis Tanah

Secara umum masyarakat Kampung Mengkapan mengenal 3 jenis tanah yaitu tanah *ghedang*, tanah kilang manis dan tanah liat pantai. Tanah liat pantai umumnya terdapat

pada pesisir pantai, tanah ini memiliki tekstur liat dan mengandung lumpur. Karena tanah ini berada di pesisir pantai maka tanah ini tidak direkomendasikan untuk bercocok tanam. Tanah kilang manis merupakan campuran antara tanah liat dan gambut, tanah ini umumnya terdapat pada daerah antara darat dan pantai. Bagi masyarakat lahan yang memiliki tanah jenis ini adalah lahan yang paling baik untuk bercocok tanam. Tanah *ghedang* adalah istilah masyarakat untuk tanah gambut. Gambut adalah tanah yang terbentuk dari sampah daunan, ranting dan batang kayu yang telah membusuk dan menumpuk, umumnya tanah ini terdapat sekitar 1,5 Km dari pantai. Tanah gambut hanya cocok untuk tanaman tertentu saja dan biaya pengelolaannya cukup besar.

Gambar 13. Tanah Liat Pantai



Sumber: Observasi Lapangan

Gambar 14. Tanah Kilang Manis



Sumber: Observasi Lapangan

Gambar 15. Tanah Gambut



Sumber: Observasi Lapangan

Berdasarkan hasil olahan data Gambut Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian

(BBSDLP), sekitar 83 % dari wilayah Kampung Mengkapan merupakan lahan gambut dengan kedalaman yang 1 hingga 5 meter. Rincian luasan gambut berdasarkan kedalaman disajikan pada tabel berikut ini.

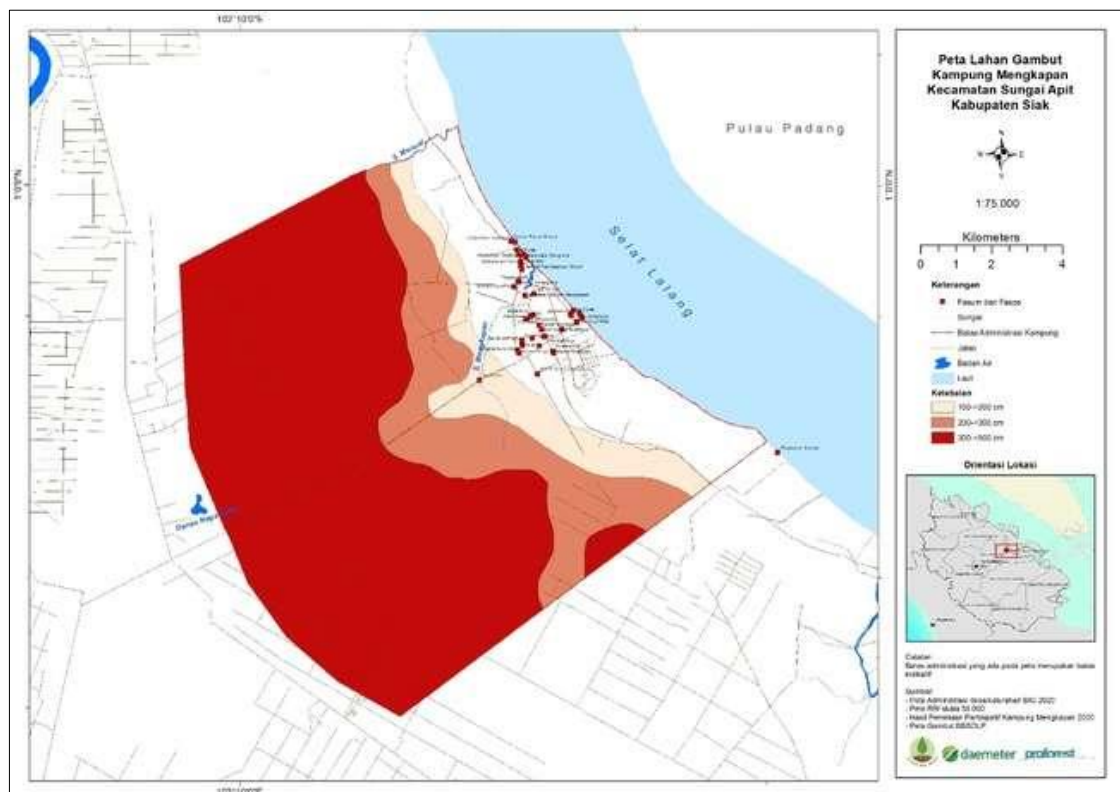
Tabel 11. Kedalaman Gambut Kampung Mengkapan

No	Ketebalan	Luas (Hektare)
1	100-<200 cm	1.176,0
2	200-<300 cm	2.214,4
3	300-<500 cm	9.250,5
Total Luas		12.640,9

Sumber: Hasil pengolahan data

Dapat dilihat pada tabel bahwa sebagian besar lahan gambut yang terdapat di Kampung Mengkapan memiliki kedalaman 3 hingga 5 meter. Peta lahan gambut Kampung Mengkapan disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 16. Peta Lahan Gambut Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.3. Iklim dan Cuaca

Indonesia adalah salah satu wilayah belahan bumi yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hutan hujan tropis, curah hujannya tinggi. Ini adalah kawasan-kawasan yang benar-benar ada di garis khatulistiwa salah satunya adalah Provinsi Riau.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wilayah yang ada di Riau adalah bagian dari wilayah hutan hujan tropis. Tidak hanya sekedar hutan hujan tropis saja, seperti yang diketahui bahwa sekitar ±4 juta hektare dari ±9 juta hektare luas wilayah provinsi riau

adalah lahan gambut.

Umumnya lahan gambut termasuk wilayah yang mempunyai curah hujan tinggi, yaitu antara 2.000 - 4.000 mm/tahun dengan jumlah bulan basah 6 - 11 bulan. Suhu beragam antara 22-30 °C, tetapi dapat meningkat mencapai 42 C. Kelembapan udara berkisar antara 80-98%, tetapi juga dapat turun mencapai 60%. Suhu dan kelembapan udara serta evapotranspirasi di lahan gambut sangat dipengaruhi oleh kondisi hutan atau vegetasi di atasnya (*Ekosistem Lahan Gambut; Mawardi, E. Maftua'ah, dan K. Anwar*).

Berdasarkan data cuaca rata-rata bulanan Kampung Mengkapan pada situs www.climate-data.org, Kampung Mengkapan memiliki suhu rata-rata setiap bulannya 26-27,3 °C dan curah hujan rata-rata 190-293 mm (Secara rinci dapat dilihat pada tabel 13).

Sementara itu berdasarkan hasil pengumplan data di lapangan bahwa sebagian besar wilayah Kampung Mengkapan merupakan lahan gambut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kampung Mengkapan memiliki iklim dan cuaca sama seperti ekosistem gambut pada umumnya.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion (FGD)* bersama masyarakat Kampung Mengkapan, secara umum Kampung Mengkapan dalam setahun mengalami 2 musim yaitu musim panas/kemarau dan musim hujan. Musim hujan biasanya mulai berlangsung pada bulan Agustus hingga Desember dan puncaknya terjadi di bulan Oktober dan November. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kampung Mengkapan pada saat musim hujan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memulai menanam tanaman pertanian maupun perkebunan sagu, karet, kelapa sawit, nenas dan lain sebagainya karena dianggap untuk mencegah bibit yang ditanam agar tidak mati kekurangan air.

Pada musim hujan ini biasanya petani sagu melakukan pemanenan terhadap sagu-sagu yang siap panen. Ini dilakukan karena pada saat musim hujan debit air di sungai-sungai dan kanal-kanal cukup tinggi. Ini lebih memudahkan untuk pengangkutan hasil panen batang-batang sagu melalui sungai atau kanal. Namun musim hujan tidak menguntungkan bagi petani karet karena pada saat musim hujan karet tidak dapat dipanen. Selain itu dampak negatif dari musim hujan adalah banjir di beberapa lokasi wilayah Kampung Mengkapan terutama Dusun I. Banjir yang terjadi memang tidak menenggelamkan pemukiman tetapi menenggelamkan jalan-jalan yang ada di Dusun I, sehingga mengakibatkan terganggunya jalur transportasi.

Sedangkan pada musim musim panas/kemarau, masyarakat menghindari bercocok tanam karena khawatir tanaman akan mati kekurangan air. Akan tetapi musim panas memberikan dampak positif bagi petani karet karena panen dapat dilakukan secara maksimal. Tidak hanya petani karet, biasanya pada musim panas inilah petani nenas melakukan panen. Permintaan nenas pada saat musim panas musim panas/kemarau lebih tinggi dari pada musim hujan dan harganya juga bagus.

Tingkat kewaspadaan masyarakat pada musim musim panas/kemarau lebih tinggi karena pada musim musim panas/kemarau lahan-lahan yang ada di Mengkapan rentan terhadap terjadinya kebakaran. Puncak musim panas/kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Mei. Pada tabel 7 kalender musim Kampung Mengkapan yang disusun melalui *Focus Group Discussion (FGD)* bersama masyarakat Kampung Mengkapan.

Tabel 12. Kalender Musim

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Peluang	Masalah
Musim														
Kerentanan														
Sawit	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Rawat/ Panen	Hasil panen meningkat pada musim hujan	Harga yang tidak stabil
Karet	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Hasil panen meningkat pada musim panas	Harga yang rendah
Nenas	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Tanam	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat		Harga menurun
Sagu								Tanam /Panen	Tanam /Panen	Tanam /Panen	Tanam /Panen	Tanam /Panen		Jumlah sagu menurun

Sumber: Focus Group Discussion Kampung Mengkapan 2020

Tabel 13. Cuaca rata-rata bulanan di Kampung Mengkapan

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Avg. Temperature (°C)	26.3	26.7	27	27.2	27.3	27.1	26.8	26.7	26.7	26.9	26.6	26.4
Min. Temperature (°C)	21.7	21.9	22.2	22.5	22.5	22.3	22	21.9	22	22.1	22	21.8
Max. Temperature (°C)	30.9	31.5	31.9	32	32.2	31.9	31.6	31.5	31.5	31.7	31.2	31
Precipitation / Rainfall (mm)	202	148	216	229	190	121	109	152	191	266	293	236

Sumber: <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/riau/Mengkapan-584107/>

3.4. Keanekaragaman Hayati

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dengan keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi dan bersifat khas. Berdasarkan ekosistemnya, lahan gambut dicirikan oleh dua ekosistem bentang lahan yaitu ekosistem hutan rawa (*swamp forest*) dan ekosistem yang berkaitan dengan perairan. Sehingga lahan gambut menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam flora dan fauna. Berbagai jenis flora dan fauna hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lahan gambut sehingga degradasi yang terjadi di lahan gambut akan berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah ini.

Mengingat keanekaragaman flora dan fauna pada ekosistem gambut sangat tinggi, identifikasi kecenderungan perubahan keanekaragaman fauna dan flora di Kampung Mengkapan pada *Focus Group Discussion (FGD)* lebih diutamakan pada jenis flora dan fauna yang umum, pemanfaatan tinggi, unik dan dilindungi yang terdapat di kawasan ekosistem gambut Kampung Mengkapan. Berikut ini disajikan tabel keanekaragaman hayati dan kecenderungan perubahan keanekaragaman flora di Kampung Mengkapan.

Tabel 14. Keanekaragaman Hayati dan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Fauna dan Flora di Kampung Mengkapan

No	Keanekaragaman Hayati	Periode 2000				Keterangan
		00-05	05-10	10-15	15-20	
1	Punak	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
2	Kempas	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
3	Meranti	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
4	Balam	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
5	Leban	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
6	Suntai	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
7	Medang	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
8	Kelat	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
9	Ramin	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
10	Terentang	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
11	Pelintai	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis
12	Sagu	IIIIIIII	IIII	II	I	Disebabkan minat masyarakat menurun karena waktu panen yang lama (7-10 tahun)
13	Karet	IIIIIIII	IIII	II	I	Disebabkan minat masyarakat menurun karena harga jula yang rendah
14	Kelapa sawit	I	II	IIII	IIIIIIII	Minat masyarakat tinggi karena perawatan dan penerjaan mudah dan harga lebih stabil

Sumber: Hasil FGD dengan masyarakat Kampung Mengkapan

Sejak awal zaman dahulunya ketergantungan masyarakat Kampung Mengkapan terhadap hutan sangat tinggi terutama dalam memanfaatkan kayu hutan alam untuk keperluan pembangunan rumah. Ini dapat dilihat di kampung hingga saat ini bahwa sebagian besar rumah-rumah masyarakat terbuat dari kayu.

Pada tahun 2000 hingga 2008 hutan mulai di tebang dan diganti dengan tanaman akasia oleh perusahaan HTI, sehingga saat ini masyarakat sudah tidak lagi bisa membangun rumah dengan menggunakan kayu karena memang kayu hutan alam sudah habis berganti menjadi akasia.

Pada tahun 2000-an kebawah sagu dan karet merupakan komoditas andalan masyarakat Kampung Mengkapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, namun sejak tahun 2006 hingga sekarang tanaman sagu sudah mulai berkurang dan berganti menjadi kelapa sawit. Masyarakat Kampung Mengkapan mulai mengenal kelapa sawit sejak tahun 2003 dan jumlahnya terus meningkat hingga sekarang.

Sama halnya dengan fauna identifikasi kecenderungan perubahan keanekaragaman fauna di Kampung Mengkapan pada *Focus Group Discussion (FGD)* lebih diutamakan pada jenis fauna yang umum, pemanfaatan tinggi, unik dan dilindungi yang terdapat di kawasan ekosistem gambut Kampung Mengkapan. Berikut ini disajikan tabel keanekaragaman hayati dan kecenderungan perubahan keanekaragaman fauna di Kampung Mengkapan.

Tabel 15. Keanekaragaman Hayati dan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Fauna di Kampung Mengkapan

No	Keanekaragaman Hayati	Periode 2000				Keterangan
		2000-2005	2005-2010	2010-2015	2015-2020	
1	Harimau	IIII	II	I		Menurun karena hutan sudah habis
2	Beruang	IIII	II	I		Menurun karena hutan sudah habis
3	Terenggiling	IIII	III	II	I	Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual
4	Rusa	IIII	III	II	I	Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual dan dikonsumsi
5	Kancil	IIII	III	II	I	Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual dan dikonsumsi
6	Murai Batu	IIII	II	I		Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual
7	Serindit	IIII	III	II	I	Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual
8	Murai Daun	IIIIIIII	IIII	II	I	Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual
9	Ikan Elang	IIII	III	II	I	Sungai sudah tidak sehat lagi dan penangkapan dengan cara setrum dan racun
10	Burung Pergam	IIII	II	I		Menurun karena hutan sudah habis dan diburu untuk dijual
11	Ayam Hutan	IIII	IIII	IIII	III	Jumlah meningkat karena predatornya sudah berkurang
12	Kera	III	III	IIII	IIII	Jumlah meningkat karena predatornya sudah berkurang
13	Babi Hutan	III	III	IIII	IIII	Jumlah meningkat karena predatornya sudah berkurang
14	Burung Ketitiran	III	III	IIII	IIII	Jumlah meningkat karena predatornya sudah berkurang

Sumber: Hasil FGD dengan masyarakat Kampung Mengkapan

Berdasarkan informasi dari masyarakat jenis-jenis fauna yang dicantumkan pada tabel diatas bahwa beberapa jenis fauna yang ada di ekosistem gambut Kampung Mengkapan sudah jarang bahkan sudah tidak lagi dapat ditemukan di wilayah Kampung Mengkapan, seperti burung Pergam sudah tidak lagi dapat ditemukan sejak tahun 2010, sedangkan jejak harimau terakhir yang ditemukan masyarakat pada tahun 2012, sejak saat itu sudah tidak lagi terlihat jejaknya.

Namun ada beberapa jenis fauna yang jumlah populasinya justru meningkat, diantaranya adalah, babi hutan, kera, burung balam dan ketitiran (perkutut). Yang menurut masyarakat, beberapa jenis fauna tersebut dulunya memang sudah ada tetapi jumlahnya tidak sebanyak sekarang.

Diduga fauna-fauna yang dulunya tersebar didalam hutan, akibat dari hutannya sudah tidak adalagi akhirnya fauna-fauna tersebut berkumpul dilokasi yang tidak jauh dari pemukiman sehingga terlihat banyak dan juga predator pemangsa sudah tidak ada lagi mengakibatkan perkembangannya meningkat drastis.

Gambar 17. Fauna yang sudah tidak dapat ditemukan di Kampung Mengkapan



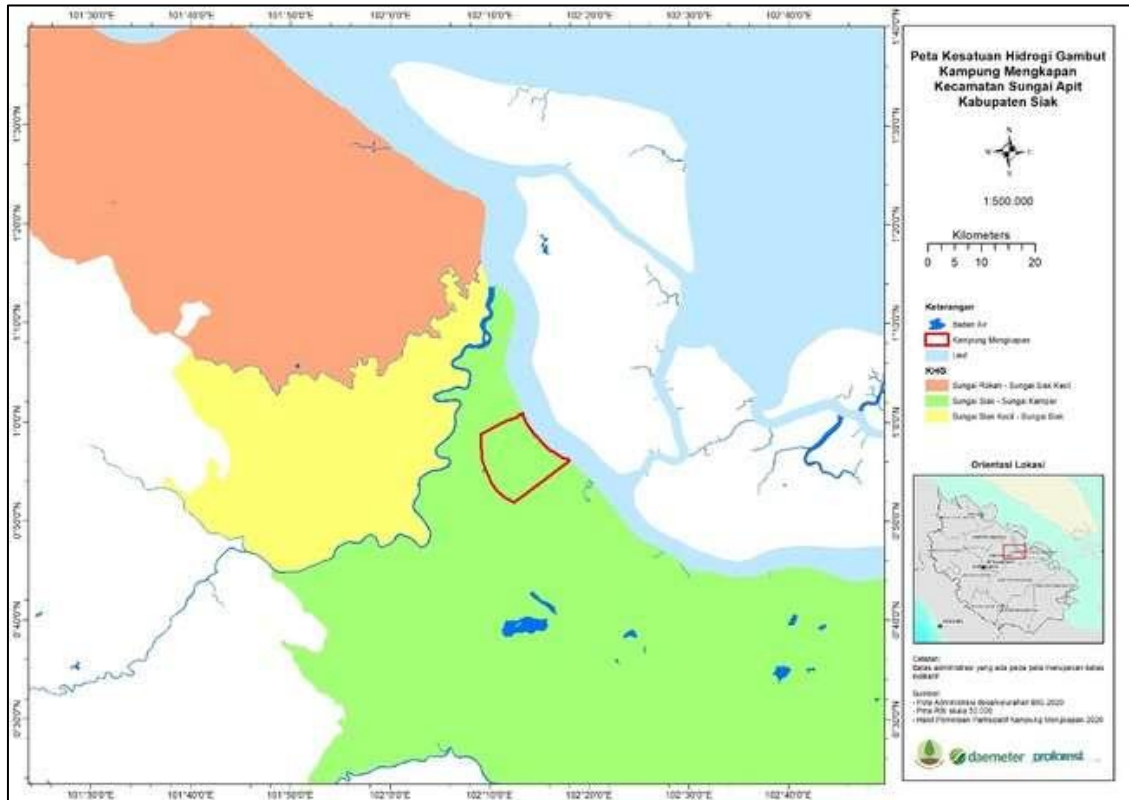
Sumber: <https://id.wikipedia.org/>

3.5. Hidrologi di Lahan Gambut

Berdasarkan data gambut Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Kampung Mengkapan lahan gambut seluas 12.640,9 hektare yang di dalamnya terdapat 2 sungai yaitu Sungai Mengkapan dan Sungai Menuous.

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, di Riau terdapat 59 KHG dengan luas 5.355.374 hektare, Kampung Mengkapan secara keseluruhan wilayahnya berada pada wilayah KHG Sungai Siak - Sungai Kampar. Pada gambar berikut ini disajikan peta KHG Kampung Mengkapan.

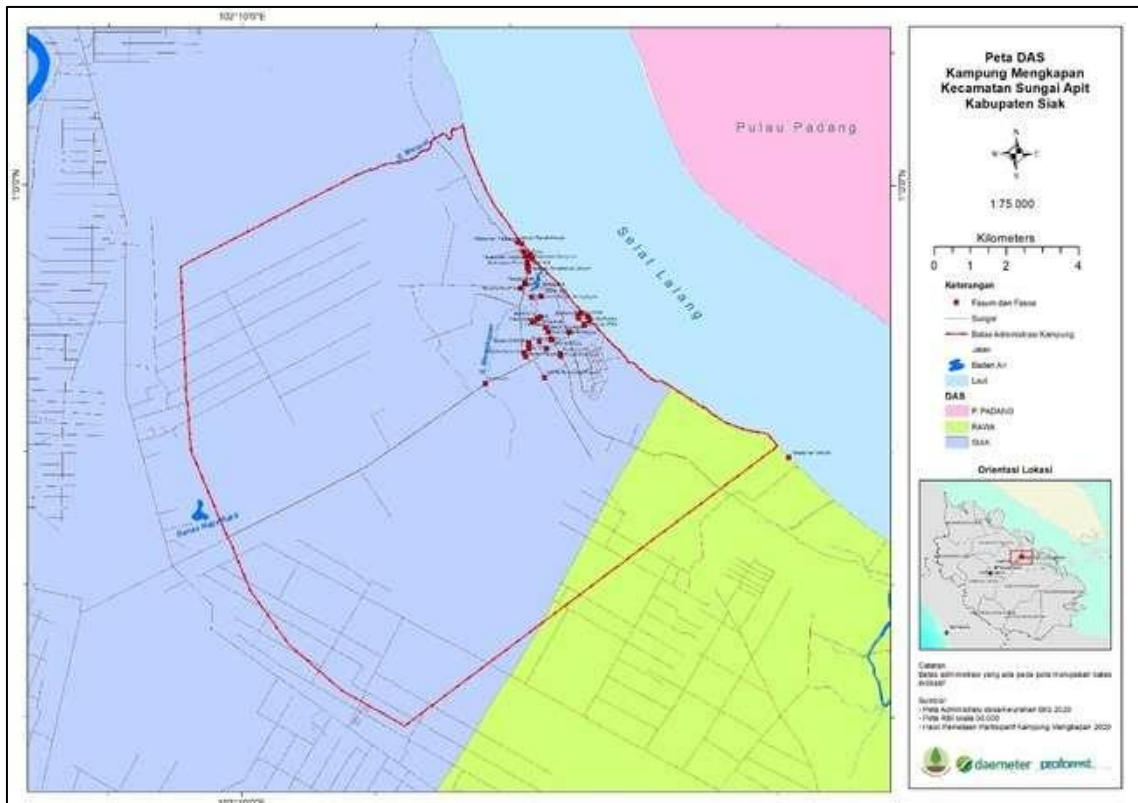
Gambar 18. Peta Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan peta Daerah Aliran Sungai (DAS), Kampung Mengkapan berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawa dimana seluas 13.891 hektare berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dan 1.271 hektare pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawa.

Gambar 19. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut

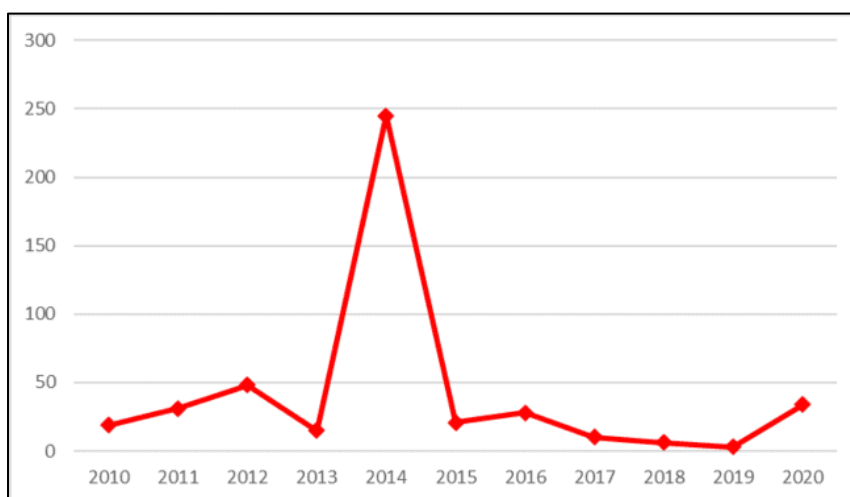
Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik yang terdapat di lantai hutan lahan basah. Lahan gambut yang sudah dibuka dan telah didrainase dengan membuat kanal, kandungan airnya menurun secara berlebihan. Penurunan air permukaan akan menyebabkan lahan gambut menjadi kekeringan. Gambut mempunyai sifat kering tak balik. Artinya, gambut yang sudah mengalami kekeringan yang ekstrim, akan sulit menyerap air kembali. Gambut yang telah mengalami kekeringan ekstrim ini memiliki bobot isi yang sangat ringan sehingga mudah hanyut terbawa air hujan, strukturnya lepas-lepas seperti lembaran serasah, mudah terbakar, dan sulit ditanami kembali. Berikut ini disajikan jumlah hotspot di Kampung Mengkapan dari analisa data hotspot Terra-Aqua Modis tahun 2010 hingga November 2020.

Tabel 16. Jumlah Hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Hotspot
2010	19
2011	31
2012	48
2013	15
2014	245
2015	21
2016	28
2017	10
2018	6
2019	3
2020	34

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar 20. Grafik Jumlah Hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020

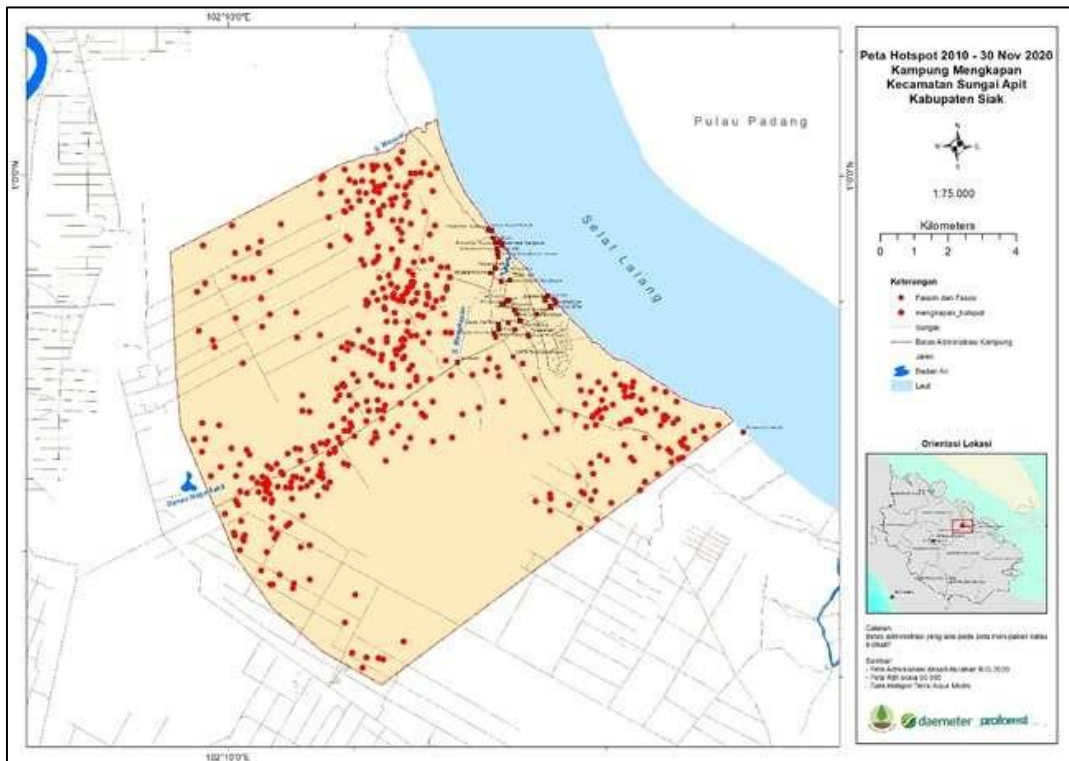


Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2010 hingga November 2020 di Kampung Mengkapan selalu terdapat hotspot. Hotspot merupakan indikator awal untuk melihat kebakaran lahan dan hutan. Dapat dilihat juga pada grafik bahwa pada tahun 2014 terdapat jumlah hotspot yang tinggi dari pada tahun yang lainnya, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa benar pada tahun 2014 Mengkapan mengalami kebakaran lahan yang cukup

besar. Pada gambar 11 disajikan peta sebaran hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010 hingga November 2020.

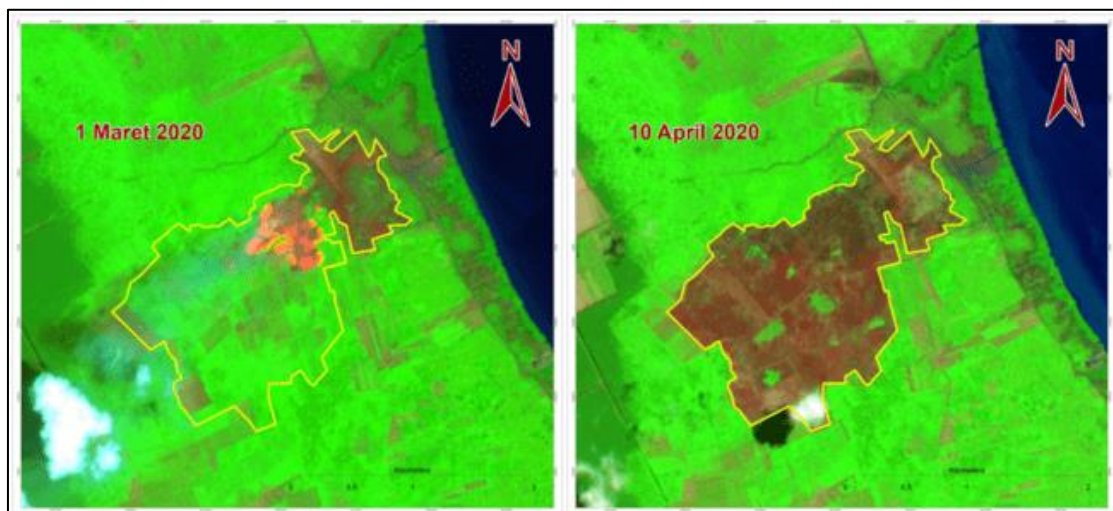
Gambar 21. Peta Sebaran Hotspot di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020



Sumber: Hasil Pengolahan Data

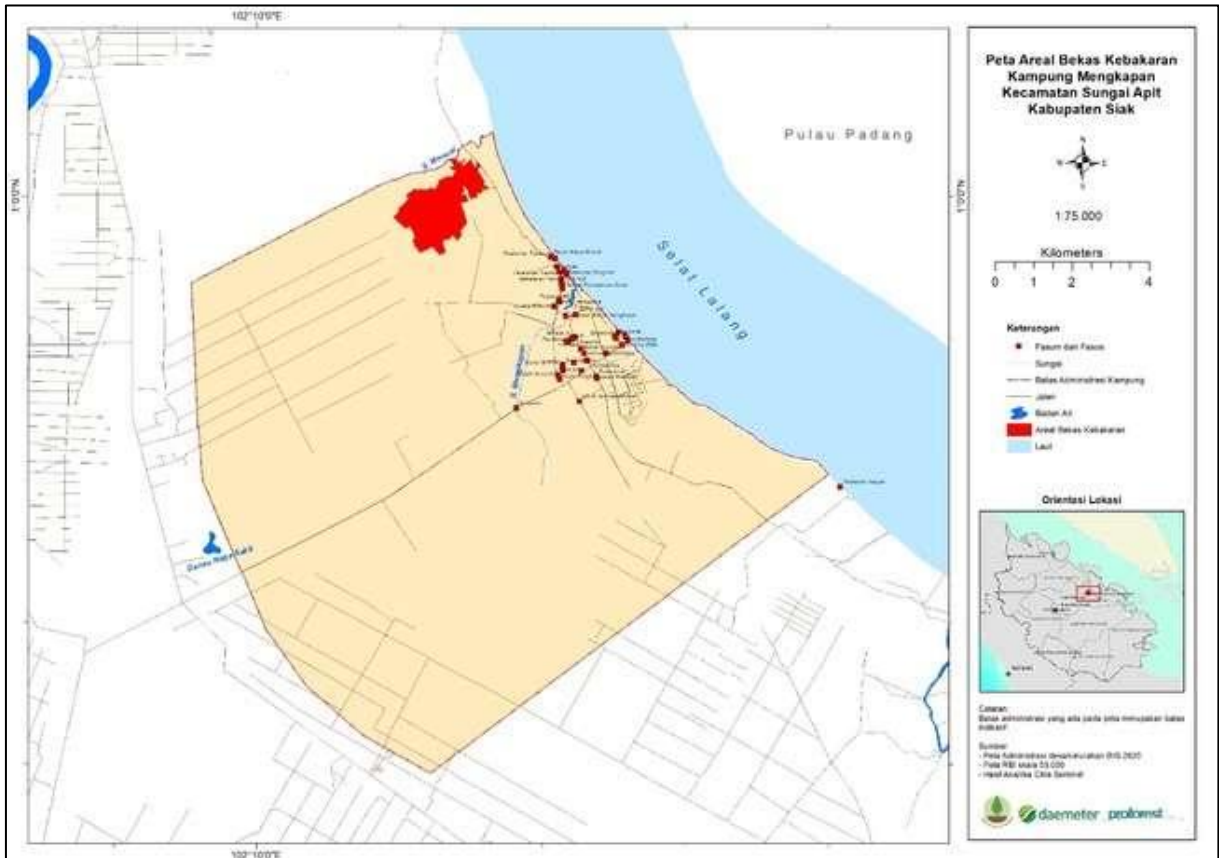
Berdasarkan informasi di lapangan, pada awal tahun 2020 Kampung Mengkapan mengalami kebakaran lahan yang cukup luas, tepatnya pada akhir pertengahan bulan Februari hingga awal bulan Maret. Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan citra satelit ditemukan bahwa benar diduga terjadi kebakaran pada akhir bulan Februari hingga awal Maret 2020. Dari hasil analisa diperkirakan kebakaran menghancurkan hamparan lahan perkebunan masyarakat seluas \pm 287 hektare. Pada gambar 12, 13 dan 14 disajikan hasil analisa citra satelit, peta dan dokumentasi areal bekas kebakaran di Kampung Mengkapan pada akhir bulan Februari hingga awal bulan Maret tahun 2020.

Gambar 22. Penampakan Areal Bekas Kebakaran pada Citra Satelit Sentinel



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar 23. Peta Areal Bekas Kebakaran tahun 2020 di Kampung Mengkapan tahun 2010-2020



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar 24. Penampakan Areal Bekas Kebakaran di Lapangan

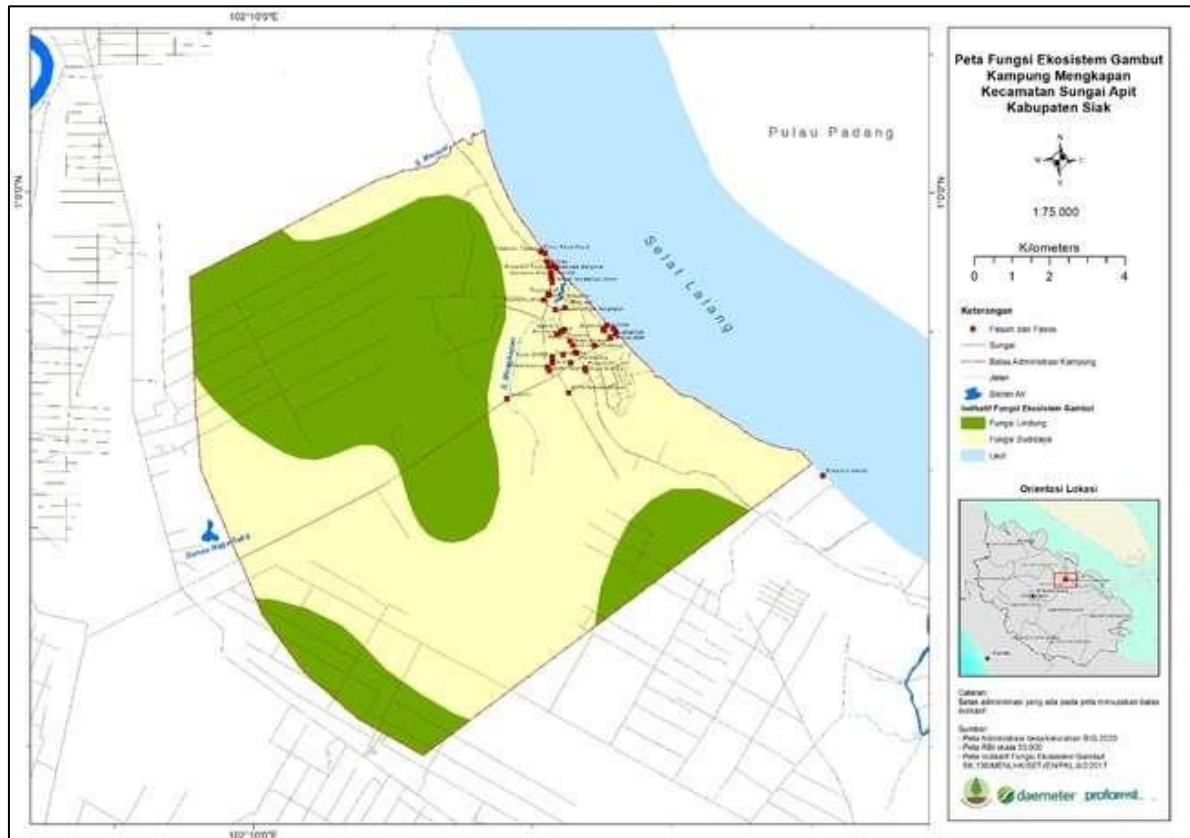


Sumber: Survey Lapangan

Hasil analisa peta Peta Fungsi Ekosistem Gambut Keputusan MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, dapat dilihat bahwa 6.571,9 hektare lahan gambut di Kampung Mengkapan adalah lahan gambut dengan Fungsi Ekosistem Gambut Lindung.

Sementara 5.120,7 hektare dari 6.571,9 hektare lahan gambut dengan Fungsi Ekosistem Gambut Lindung yang ada di Kmapung Mnekgapan, berdasarkan analisa spasial dan pemantauan langsung di lapangan adalah areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT, Arara Abadi. Berikut ini disajikan peta Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) di Kampung Mengkapan.

Gambar 25. Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Bab IV Kependudukan

4.1. Data Umum Penduduk

Kampung Mengkapan terdiri atas 2 dusun, 5 Rukun Keluarga (RK/Setara RW), dan 15 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data kependudukan Kampung Mengkapan pada tahun 2020, jumlah keseluruhan penduduk adalah 3.066 jiwa yang terdiri 1.604 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.462 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 766. Secara rinci jumlah penduduk Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020

No.	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1	Penduduk Laki-laki	1.604
2	Penduduk Perempuan	1.462
3	Kepala Keluarga (KK) Laki-laki	685
4	Kepala Keluarga (KK) Perempuan	81
5	Total Jumlah Penduduk	3.066
6	Total Jumlah Kepala Keluarga (KK)	766

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

4.1.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia produktif

Berdasarkan data kependudukan Kampung Mengkapan Tahun 2020, sekitar 54% dari total penduduknya berada dalam usia produktif. Rincian jumlah penduduk usia produktif Kampung Mengkapan dalam jiwa disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan usia produktif

No.	Keterangan	Jumlah (jiwa)
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1.657
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	253
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	567
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	442
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	420
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	1

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

4.1.2. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan

Berdasarkan data kependudukan Kampung Mengkapan Tahun 2020, sekitar 40% dari total KK penduduknya berada pada tingkat keluarga sejahtera 1, 6,5% pada tingkat keluarga prasejahtera dan 5,6% pada tingkat sejahtera 3 plus. Rincian jumlah Kepala Keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Jumlah Kepala Keluarga Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan tingkat kesejahteraan

No.	Keterangan	Jumlah (KK)
1	Jumlah keluarga prasejahtera	50
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	309
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	122

4	Jumlah keluarga sejahtera 3	242
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	43
6	Total jumlah kepala keluarga	766

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

4.1.3. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan data kependudukan Kampung Mengkapan Tahun 2020, sekitar 20% dari total penduduknya dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, 18,7% dengan tingkat pendidikan D1 dan 16% dengan tingkat pendidikan SMA sederajat. Rincian jumlah penduduk Kampung Mengkapan berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 20. Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum tamat SD	-	-	285
2	Kelompok Bermain PAUD	-	-	274
3	TK	-	-	124
4	SD/ Sederajat	308	312	620
5	SMP/ Sederajat	265	229	494
6	SMA/ Sederajat	318	257	575
7	D1 / Sederajat	4	4	8
8	D2 / Sederajat	-	-	0
9	D3 / Sederajat	4	16	20
10	S 1 / Sederajat	26	39	65
11	S 2 / Sederajat	1	-	1
12	S 3 / Sederajat			

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

4.1.3. Jumlah penduduk berdasarkan berdasarkan profesi/pekerjaan

Berdasarkan data kependudukan Kampung Mengkapan tahun 2020, sekitar 14,5% dari total penduduknya memiliki profesi/pekerjaan sebagai buruh harian lepas, 4% memiliki profesi/pekerjaan sebagai petani dan 2% memiliki profesi/pekerjaan sebagai wiraswasta. Rincian jumlah penduduk Kampung Mengkapan berdasarkan profesi/pekerjaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 21. Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2020 berdasarkan profesi/pekerjaan

No.	Profesi/Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	TNI/Polri	2
2	Petani	131
3	Pegawai Negeri Sipil	28
4	Honorer	-
5	Guru	66
6	Pedagang	29
7	Karyawan Swasta	-
8	Nelayan	6
9	Buruh Harian Lepas	447
10	Buruh Tani	-
11	Tukang Cukur	2
12	Tukang Jahit	4
13	Tukang Las/P.Besi	1
14	Tukang	61
15	Bidan	2
16	Perawat	1

No.	Profesi/Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
17	Sopir	19
18	Wiraswasta	87
19	Perangkat Kampung	8

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tingkat penambahan penduduk setiap tahun dalam jangka waktu tertentu disebut dengan angka pertumbuhan penduduk yang dinyatakan dengan satuan persentase (%). Angka pertumbuhan penduduk ini sekaligus mencerminkan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah setiap tahunnya. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduk mengindikasikan semakin cepat laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, apabila angka pertumbuhan penduduk yang rendah menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang lambat.

Berkenaan dengan angka pertumbuhan penduduk, kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Laju pertumbuhan cepat, apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya.
2. Laju pertumbuhan sedang, apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1% – 2% setiap tahunnya.
3. Laju pertumbuhan lambat, apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya.

Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit. Rumus Model Geometrik menghitung presentase pertumbuhan dan prediksi pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Pertumbuhan penduduk:

$$r = \left(\frac{p_t}{p_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

prediksi pertumbuhan penduduk

$$p_t = p_0 (1 + r)^t$$

Dimana:

p_t : Jumlah penduduk di tahun t

p_0 : Jumlah penduduk di tahun dasar

t : Jangka waktu (selisih)

r : Laju pertumbuhan penduduk (%)

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Kampung Mengkapan, diketahui bahwa penduduk pada tahun tahun 2014 berjumlah 2.813 jiwa yang terdiri dari 677 Kepala Keluarga (KK) dan pada tahun tahun 2020 berjumlah 3.066 jiwa yang terdiri dari 766 KK. Terlihat bahwa terjadi

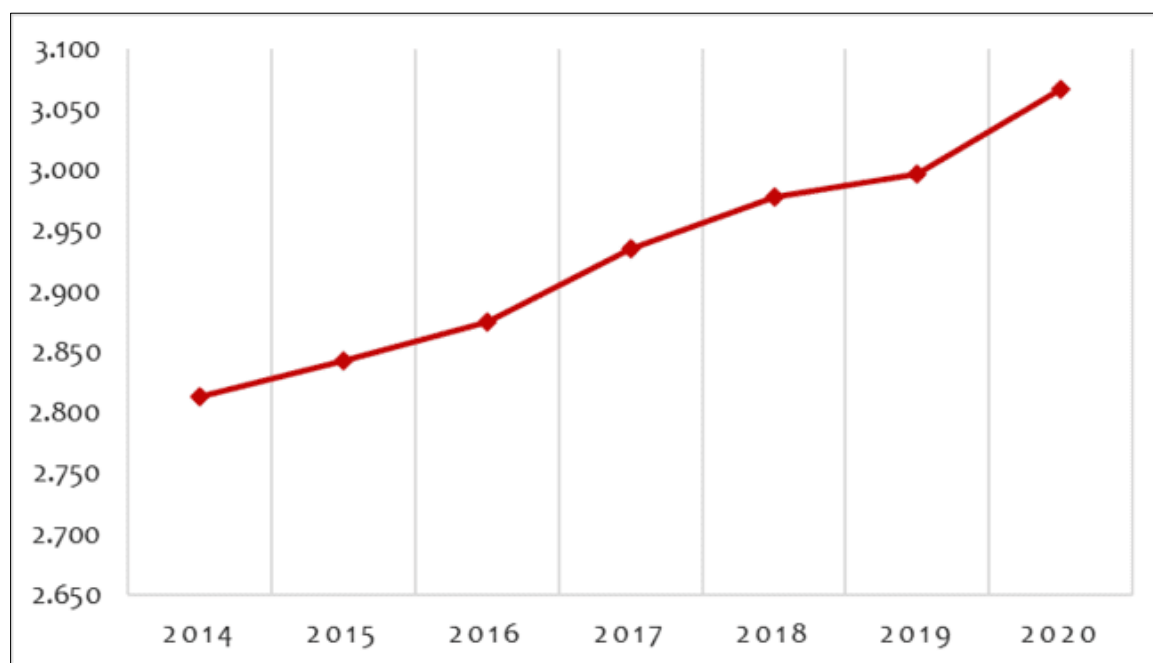
peningkatan jumlah penduduk sebanyak 253 jiwa atau 89 KK dalam kurun waktu 6 tahun. Rincian jumlah penduduk Kampung Mengkapan tahun 2014 hingga 2020 disajikan pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 22. Jumlah Penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2014 - 2020

No.	Tahun	Jumlah laki-laki (jiwa)	Jumlah perempuan (jiwa)	Total (jiwa)	Jumlah (KK)
1	2014	1.439	1.374	2.813	677
2	2015	1.452	1.391	2.843	689
3	2016	1.516	1.359	2.875	713
4	2017	1.535	1.400	2.935	721
5	2018	1.559	1.419	2.978	744
6	2019	1.566	1.431	2.997	745
7	2020	1.604	1.462	3.066	766

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

Gambar 26. Diagram garis jumlah penduduk Kampung Mengkapan Tahun 2014 – 2020



Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan 2020

Dari hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk Kampung Mengkapan diketahui sebesar 1,4 %. Maka dengan diketahui pula bahwa tingkat laju pertumbuhan penduduk Kampung Mengkapan berada pada kriteria sedang dan diprediksi jumlah penduduk Kampung Mengkapan pada tahun 2020 adalah 3.294 jiwa.

4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu wilayah per satuan luas atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per kilometer persegi (Km^2). Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/PRT/1960, tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tidak padat penduduk dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/ Km^2 ;

2. Kurang padat penduduk dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa/Km²;
3. Cukup padat penduduk dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa/ Km²;
4. Sangat padat penduduk dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401/Km²

Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas wilayah (Km}^2\text{)}}$$

Kampung Mengkapan memiliki luas wilayah ±15.175,8 hektare yang jika dikonversi menjadi satuan Km² yaitu 151,76 Km². Dengan wilayah seluas 151,76 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 3.066 jiwa maka kepadatan penduduk Kampung Mengkapan adalah 20 jiwa/Km². Maka berdasarkan klasifikasi tingkat kepadatan penduduk, Kampung Mengkapan berada pada tingkatan wilayah yang tidak padat penduduk.

Bab V Pendidikan dan Kesehatan

5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

5.1.1. Tenaga Pendidikan

Secara keseluruhan terdapat 65 tenaga pendidikan yang berasal dari 3 tingkat jenjang pendidikan yang ada di Kampung Mengkapan yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari 65 tenaga pengajar, sebanyak 47 orang diantaranya adalah tenaga pengajar di sekolah negeri yaitu SDN 008, SDN 022 dan SMPN 003. Dari 47 orang tenaga pengajar tersebut 15 orang diantaranya sudah berstatus PNS dan 8 orang lagi berstatus tenaga pengajar honorer. Rincian jumlah tenaga pengajar di setiap sekolah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Jumlah Tenaga Pendidikan di Kampung Mengkapan

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah Tenaga Pendidikan	Keterangan
1.	TK Sayang Bunda	3	Tenaga pengajar dibawah naungan yayasan
2.	TK Bina Harapan	3	Tenaga pengajar dibawah naungan yayasan
3.	SDN 022	12	4 tenaga pengajar masih berstatus honorer
4.	SDN 008	14	4 tenaga pengajar masih berstatus honorer
5.	SMPN 003	21	7 tenaga pengajar masih berstatus honorer
6.	MTsS Raudhotul Ulum	12	Tenaga pengajar dibawah naungan yayasan

Sumber: Observasi dan wawancara 2020

5.1.2. Tenaga Kesehatan

Kampung Mengkapan hanya memiliki 2 orang tenaga kesehatan yang menetap di kampung. Kedua tenaga kesehatan tersebut melayani di fasilitas kesehatan Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin. Untuk tenaga kesehatan di Posyandu tenaga kesehatan didatangkan dari kecamatan setiap satu bulan sekali, karena ada dua posyandu sehingga tenaga kesehatan posyandu yang dari kecamatan berkunjung 2 kali dalam sebulan. Berikut ini rincian jumlah tenaga kesehatan pada setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kampung Mengkapan.

Tabel 24. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kampung Mengkapan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan	Keterangan
1.	Puskesmas Pembantu	1	1 orang Bidan
2.	Posyandu	0	1 orang Bidan yang didatangkan dari kecamatan setiap 1 bulan sekali
3.	Pondok Bersalin	1	1 orang Bidan
4.	Puskesmas		Belom beroperasi, masih dalam tahap pembangunan

Sumber: Observasi dan wawancara 2020

5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

5.2.1. Fasilitas Pendidikan

Terdapat 7 fasilitas pendidikan yang ada di Kampung Mengkapan dari jenjang PAUD, TK hingga SMP yang terdiri dari 1 PAUD, 2 TK, 2 SD negeri, 1 SMP dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Secara keseluruhan fasilitas pendidikan yang ada di Kampung Mengkapan dalam kondisi baik dan

beroperasi dengan baik. Berikut ini disajikan dokumentasi kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Kampung Mengkapan.

Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa kondisi bangunan MTs Raudhatul Ulum terdiri dari 2 bangunan yang masing masing bangunan terdiri dari 2 ruangan belajar. Salah satu dari 2 bangunan dalam kondisi rusak serta ruangan belajarnya dalam kondisi kurang layak. Selain itu gedung MTs ini juga digunakan untuk aktifitas pendidikan MDA dengan cara bergantian, pagi hingga siang digunakan untuk aktifitas belajar siswa-siswi MTS dan sore hari aktifitas belajar siswa-siswi MDA.

Gambar 27. Fasilitas Pendidikan Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Observasi Lapangan

5.2.1 Fasilitas Kesehatan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Kampung Mengkapan Memiliki 4 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 1 Puskesmas Pembantu (PUSTU), 2 Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), 1 Pondok Bersalin dan 1 Puskesmas. Secara keseluruhan kondisi fasilitas kesehatan ini dalam kondisi baik dan beroperasi dengan baik. Hanya kondisi bangunan Posyandu yang sedikit kurang layak serta gedung puskesmas yang belum beroperasi karena masih dalam tahap pembangunan.

Gambar 28. Fasilitas Kesehatan Kampung Mengkapan



Sumber: Observasi lapangan

5.3. Angka Partisipasi Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa tingkat partisipasi anak-anak di Kampung Mengkapan beberapa belakangan cukup tinggi karena sudah sangat jarang sekali ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ditambah lagi kepedulian orang tua terhadap pendidikan juga meningkat. Meskipun di Kampung Mengkapan tidak terdapat fasilitas pendidikan jenjang SMA/ sederajat namun kemudahan akses jalan mempermudah anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA/ Sederajat di kampung tetangga seperti Kampung Sungai Rawa, Kampung Lalang hingga Sungai Apit. Sehingga kebanyakan anak-anak masyarakat Kampung Mengkapan sudah jarang yang hanya tamatan SMP atau SD, bahkan kebanyakan yang telah menamatkan SMA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang ada di Kota Siak maupun Pekanbaru. Berikut ini disajikan tabel jumlah peserta didik di Kampung Mengkapan berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2019.

Tabel 25. Jumlah peserta didik di Kampung Mengkapan berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	79
2.	Sekolah Dasar (SD)	393
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMPN)/Sederajat	153
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat	Tidak ada data
5.	Perguruan Tinggi	Tidak ada data

Sumber: Fasilitas pendidikan Kampung Mengkapan

Untuk data peserta didik pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat belum ada data karena memang fasilitas jenjang pendidikan SMA/ sederajat dan perguruan tinggi yang terdapat di Mengkapan. Akan tetapi berdasarkan informasi kebanyakan anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/ sederajat dan begitu juga yang telah menamatkan jenjang pendidikan SMA/ sederajat melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikut ini disajikan tabel jumlah masyarakat Kampung Mengkapan berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel 26. Jumlah masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2	SD/ Sederajat	308	312	620
3	SMP/ Sederajat	265	229	494
4	SMA/ Sederajat	318	257	575
5	D1 / Sederajat	4	4	8
6	D2 / Sederajat	-	-	0
7	D3 / Sederajat	4	16	20
8	S 1 / Sederajat	26	39	65
9	S 2 / Sederajat	1	-	1

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan

5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap

Tidak ada data mengenai jumlah korban korban bencana kebakaran dan asap di Kampung Mengkapan. Namun berdasarkan hasil wawancara masyarakat, ketika terjadi bencana kebakaran dan asap banyak dari masyarakat yang mengalami sakit batuk akan tetapi tidak ada parah hingga harus dibawa kerumah sakit atau yang meninggal dunia.

Bab VI Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1. Sejarah Kampung

Kampung Mengkapan merupakan salah satu kampung tertua di Kecamatan Sungai Apit. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun berapa berdirinya Kampung Mengkapan ini. Namun berdasarkan penuturan tetua kampung, Kampung Mengkapan sudah ada sejak sekitar tahun 1911. Awal mula Kampung Mengkapan terbentuk dari beberapa masyarakat yang berasal dari Pulau Bengkalis yang datang dengan menyusuri Laut Selat Lalang yang kemudian masuk menyusuri Sungai Mengkapan untuk mencari kayu dan berburu.

Masyarakat melihat adanya potensi lahan yang belum ada pemiliknya maka masyarakat mulai membuka pemukiman di pesisir pantai dan muara sungai Mengkapan untuk menetap dan berkebun. Pada awalnya masyarakat yang bermukim di muara Sungai Mengkapan berladang padi. Seiring perkembangan, karena pemukiman semakin ramai maka dibentuk menjadi sebuah perkampungan.

6.2. Etnis, Bahasa, Agama

Berdasarkan etnis, Kampung Mengkapan didominasi oleh Suku Melayu namun terdapat juga beberapa etnis dari suku lain seperti Jawa, Bugis dan Banjar dengan jumlah minoritas sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Melayu. Berdasarkan agama, masyarakat Melayu memang sangat identik dengan agama Islam sehingga mayoritas masyarakat Kampung Mengkapan adalah penganut agama Islam.

6.3. Legenda

Dari hasil penggalan informasi, tidak ditemukan cerita rakyat/ legenda/ fabel yang berkembang di Kampung Mengkapan. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada lagi narasumber seperti tetua kampung yang biasanya memiliki pengetahuan tentang cerita rakyat/legenda/fabel. Akses Kampung Mengkapan telah terbuka lebar terutama semenjak dibukanya kawasan Pelabuhan Buton. Terbukanya akses ini menyebabkan Kampung Mengkapan menjadi heterogen dan terpapar kemajuan zaman sehingga cerita rakyat tidak lagi berkembang.

6.4. Kesenian Tradisional

Mayoritas masyarakat Kampung Mengkapan adalah suku Melayu. Kesenian tradisional dan adat istiadat yang berkembang sangat kental dengan seni budaya Melayu sebagai mana desa-desa lain di Kabupaten Siak. Kesenian tradisional yang masih berkembang saat ini antara lain:

1. Prosesi pernikahan

Masyarakat Mengkapan masih menggunakan adat istiadat Melayu dalam prosesi pernikahan. Dalam prosesi pernikahan terdapat tradisi silat, pantun dan kompong. Silat dilakukan di awal prosesi pernikahan ketika calon mempelai pria hendak memasuki lokasi pesta pernikahan. Calon mempelai pria dan wanita akan mengirimkan utusan masing-masing dan beradu ketangkasan dalam gelanggang silat. Sebelum utusan calon mempelai pria dapat mengalahkan utusan dari calon mempelai wanita, maka prosesi selanjutnya tidak akan dilanjutkan. Prosesi silat ini menjadi pembuka palang pintu rombongan mempelai pria untuk memasuki arena pesta pernikahan.

Setelah bersilat, akan dilanjutkan dengan prosesi berbalas pantun. Masing-masing mempelai akan berbalas pantun hingga diperbolehkan masuk di arena pesta. Seluruh prosesi ini akan diiringi

dengan kompang. Kompang adalah alat musik tabuh sejenis rebana. Kompang juga akan ditabuh pada saat pengantin diarak keliling kampung.

2. Permainan Gasing

Gasing adalah permainan tradisional yang saat ini kembali di galakan di Provinsi Riau. Gasing terbuat dari sejenis kayu keras, dibentuk sedemikian rupa dan diberi bandul. Bandul adalah besi berbentuk bulat yang ditanamkan di ujung gasing. Bandul berfungsi sebagai pijakan gasing di tanah. Untuk memainkannya, gasing akan dikaitkan dengan tali yang dililit melingkar kemudian dilemparkan di arena. Arena berupa tanah lapang dengan tanah yang sudah cukup memadat. Ketika gasing dilemparkan dan lepas dari tali pengaitnya, gasing akan berputar di arena permainan. Saat ini sering diadakan turnamen gasing, turnamen ini mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. Gasing yang paling lama bertahan dalam putarannya akan menjadi pemenang turnamen.

6.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Setelah periode berladang padi, masyarakat Mengkapan mulai mengembangkan komoditas sagu. Dalam menanam sagu masyarakat menggunakan sistem tebang lorong. Tebang lorong adalah teknik membersihkan lahan dengan cara menebas semak/belukar pada lahan dengan membuat jalur lurus sehingga membentuk seperti lorong-lorong. Pada teknik ini lahan tidak ditebas habis, hanya pada lorong- lorongnya saja yang dibersihkan, sedangkan pada bagian pinggiran kiri dan kanan lorong dibiarkan saja bersemak atau berhutan. Pada lorong-lorong tersebut kemudian ditanami dengan sagu. Sagu-sagu dibiarkan tumbuh bersama tumbuhan- tumbuhan lain baik itu semak maupun tumbuhan hutan. Dengan sistem tebang lorong ini, ekosistem hutan tetap terjaga dan masyarakat tetap bisa mendapatkan nilai ekonomi dari sagu.

Selain kearifan lokal dalam menanam sagu, masyarakat Mengkapan mengenal tradisi semah kampung. Semah ini ditujukan untuk membersihkan kampung dari hal-hal yang tidak baik dikampung. Semah biasanya dilakukan setelah panen padi. Saat ini tidak ada lagi tradisi semah kampung karena masyarakat Mengkapan tidak ada yang berladang padi.

Bab VII Pemerintahan dan Kepemimpinan

7.1. Pembentukan Pemerintahan

Tidak terdapat informasi yang valid mengenai sejak kapan terbentuknya pemerintahan Kampung Mengkapan, namun masih dapat ditelusuri nama-nama pemimpin kampung yang pernah menjabat. Berikut ini nama-nama yang diketahui pernah menjabat sebagai pemimpin Kampung Mengkapan:

Tabel 27. Sejarah Pemerintahan Kampung Sebelum Pemekaran

Tahun	Nama Pemimpin	Keterangan
...*	Ujang	Penghulu Kampung Mengkapan
...*	Endang	Penghulu Kampung Mengkapan
...*	Umar Baki	Penghulu Kampung Mengkapan
...*	Mentai	Penghulu Kampung Mengkapan
...*	Tahab	Penghulu Kampung Mengkapan
...*	Husin Sururi	Penghulu Kampung Mengkapan
1975-1980	Mis Abdullah	Penghulu Kampung Mengkapan
1980-1999	M. Jasa	Penghulu Kampung Mengkapan
Keterangan * : tidak dapat dipastikan kapan awal dan akhir dari jabatan kepemimpinan Penghulu		

Sumber: Hasil Wawancara

Pada tahun 1999 terbentuknya Kabupaten Siak yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada tahun 2000 dengan berjalannya pemerintahan Kabupaten Siak, pada masa itu Kampung Mengkapan pertama kali melakukan sistem pemilihan kepala desa dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat yang terus berjalan hingga sekarang. Pada saat melakukan pemilihan kepala desa secara langsung tersebut terdapat dua calon yang mengajukan diri untuk menjadi kepala desa yaitu M. Jasa yang merupakan kepala desa periode sebelumnya ketika masih Kabupaten Siak masih bagian dari Kabupaten Bengkalis, bersaing dengan Drs. M. Nizar yang merupakan calon kepala desa termuda pada saat itu.

Pada pemilihan kepala desa secara langsung pertama tersebut M. Jasa terpilih untuk periode 2000-2006. Ini menjadikan pertama kalinya Kampung Mengkapan memiliki pemimpin yang dipilih dengan sistem pemilihan oleh masyarakat secara langsung dengan masa jabatan 6 tahun dan tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Siak. Berikut ini nama-nama kepala desa/penghulu yang terpilih semenjak Mengkapan terpisah dari Kabupaten Bengkalis dan menjadi bagian dari Kabupaten Siak.

Tabel 28. Sejarah Pemerintahan Kampung Setelah Pemekaran

Tahun	Nama Pemimpin	Keterangan
2000-2006	M. Jasa	Penghulu Kampung Mengkapan
2007-2008	Syaefuddin	Pejabat Sementara
2008-2014	Nawawi	Penghulu Kampung Mengkapan
2014-2020	Nawawi	Penghulu Kampung Mengkapan
2020-2026	Muhir	Penghulu Kampung Mengkapan

Sumber: Hasil Wawancara

7.2. Struktur Pemerintahan Kampung Mengkapan 2020-2026

Dikabupaten Siak penamaan Desa diganti dengan Kampung, hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Tidak hanya desa saja yang dirubah tetapi penyebutan untuk aparat pemerintahan juga dirubah seperti; Kepala Desa diganti menjadi Penghulu, Sekretaris Desa diganti menjadi Kerani, Rukun Warga diganti Menjadi Rukun Kampung dan beberapa yang lainnya.

Berdasarkan hasil pemilihan Penghulu Kampung (Pilkampung) secara serentak pada 20 November 2019, Penghulu Kampung Mengkapan saat ini dijabat oleh Muhir yang dilantik pada awal tahun 2020 untuk masa jabatan 2020-2026. Bagan struktur pemerintahan Kampung Mengkapan 2020-2026 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 29. Bagan Struktur Pemerintahan Kampung Mengkapan



Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan

Tugas pokok dan fungsi pemerintahan kampung masih tetap mengaju kepada peraturan dan undang-undang desa, berikut ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kampung/Desa.

Tabel 29. Tupoksi Perangkat Kampung Mengkapan

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1	Penghulu/Kepala Desa	Menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Kewajiban Kepala Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; pemelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
		mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi sumber daya alam, melestarikan lingkungan hidup dan memberi informasi kepada masyarakat desa.
2	Kerani/Sekretaris Desa	Membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa; membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa; mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa; melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; pelaksana tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa.
3	Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam)/Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 tentang UU Desa). Fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
4	Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)	Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa; melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa; melaksanakan pengelolaan administrasi umum; sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; mengelola administrasi perangkat desa; mempersiapkan bahan-bahan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
5	Kepala Urusan Pemerintah (Kaur Pemerintah)	Membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa. Sedangkan fungsi adalah melaksanakan administrasi kependudukan; mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa; melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan; melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa; mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakanketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
		kepada desa.
6	Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)	Membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat; melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan; mengelola tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Sumber: UU RI No 6 Tahun 2014

7.3. Kepemimpinan Tradisional

Kampung Mengkapan merupakan salah satu kampung tertua di Kecamatan Sungai Apit. Kemungkinan sebelum menjadi desa secara defenitif terdapat kepemimpinan tradisional. Namun tidak ada catatan sejarah atau narasumber yang dapat diwawancarai terkait struktur kepemimpinan tradisional di Kampung Mengkapan. Informasi yang dapat digali hanya struktur kepemimpinan formal sebagaimana dijelaskan di atas.

7.4. Aktor Berpengaruh

Dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat, tentunya terdapat tokoh-rokoh berpengaruh di kawasan tersebut. Adapun aktor berpengaruh di Kampung Mengkapan adalah:

a. Aktor yang berpengaruh dalam bidang politik:

Aktor yang berpengaruh dalam bidang politik kampung adalah orang yang memiliki jabatan politik di kampung, seperti Penghulu, BAPEKAM, LKMKAM beserta perangkatnya. Penghulu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. BAPEKAM merupakan unsur penting dalam pengawas penyelenggara Pemerintah Desa. Sedangkan LKMKAM berperan dalam melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

b. Aktor yang berpengaruh dalam bidang ekonomi:

Aktor yang berpengaruh dalam bidang ekonomi yaitu tauke sawit, penguasa lahan perkebunan sawit dan sagu dan pedagang. Aktor tersebut menguasai sumber-sumber ekonomi di kampung.

c. Aktor yang berpengaruh di desa dalam bidang sosial:

Orang-orang yang dimintai nasehat/pendapat oleh warga kampung untuk urusan- urusan bersama seperti gotong royong, perayaan panen, kematian, bencana dan lain-lain di Kampung Mengkapan adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tetua kampung.

7.5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Konflik lahan biasanya terjadi antar sesama masyarkat Kampung Mengkapan. Konflik biasanya terjadi karena batas antar lahan yang belum jelas. Untuk menyelesaikan konflik masyarkat

mengadu kepada Penghulu. Penghulu akan memanggil kedua belah pihak yang berkonflik dan mengadakan musyawarah mufakat. Di Kampung Mengkapan belum ada kelembagaan khusus yang menangani konflik.

7.6. Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

Dalam proses pengambilan keputusan kampung, terdapat BAPEKAM yang bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, BAPEKAM akan mengundang seluruh pihak terkait seperti RT, RW, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, kelompok tani dan kelompok lain dikampung. Musyawarah desa akan dipimpin oleh BAPEKAM dan kemudian dibentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Kampung. Setelah disusun Rencana Pembangunan Kampung, akan diadakan kembali musyawarah sebagai mekanisme pengesahan rencana pembangunan kampung.

Bab VIII Kelembagaan Sosial

8.1. Organisasi Sosial Formal

Pembentukan organisasi sosial formal serta pembentukan pengurus kelembagaannya pada umumnya dilakukan melalui proses Musyawarah. Pembentukan kelembagaan ada yang mendasarkan pada kesepakatan kelompok atau memang sudah menjadi ketetapan Peraturan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan pembentukan lembaga dan pengurus kelembagaan yang disahkan oleh instansi tertentu. Keberadaan organisasi sosial formal yang memiliki peran dan manfaat terhadap masyarakat Kampung Mengkapan diidentifikasi oleh warga Kampung Mengkapan berjumlah 9 lembaga/organisasi. Lembaga organisasi sosial formal yang diidentifikasi berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Kampung Mengkapan adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Organisasi sosial formal di Kampung Mengkapan

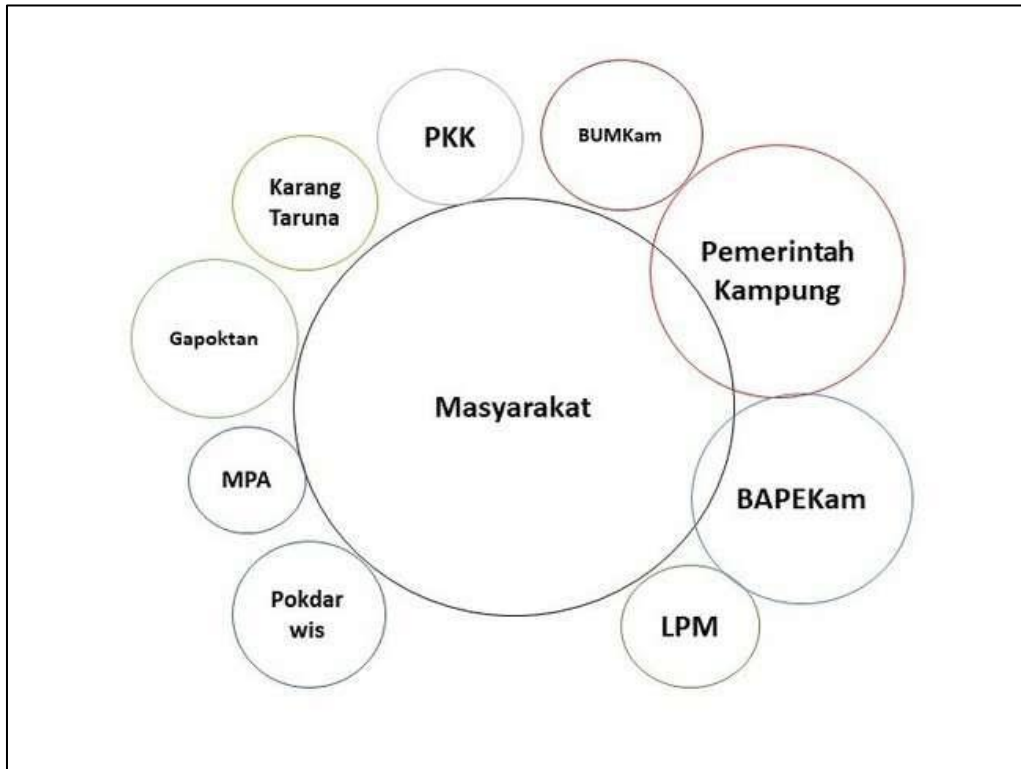
No	Nama Organisasi	Tahun Berdiri	Pendiri	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Tujuan Pendirian
1	Pemerintah kampung	2000	Kab. Siak	Muhir	11	Menjalankan pemerintahan Kampung dan pelayanan masyarakat
2	Badan Permusyawaratan Kampung	2000	Masyarakat	Khairul	9	Menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2000	Masyarakat	Mahasiswa	5	Menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2000	Masyarakat	Amidah	15	Pemberdayaan Wanita
5	Karang Taruna	2000	Masyarakat	Sukarto	25	Pembinaan pemuda
6	GAPOKTAN/ Kelompok Tani	2016	Masyarakat	Supriyanto	6	Mempersatukan dan mewadahi seluruh petani yang ada di kampung
7	Badan Usaha Milik Kampung	2016	Masyarakat	Julizar	8	Meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
8	Kelompok Sadar Wisata	2013	Masyarakat	Dedi Marantika	15	Menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove
9	Masyarakat Peduli Api	2015	Masyarakat	Jefri	6	Penanggulangan bencana kebakaran

Sumber: Wawancara dan FGD dengan masyarakat Desa Mengkapan

Berdasarkan analisis diagram Venn, kelembagaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat adalah pemerintah kampung. Karena ketergantungan urusan pembangunan kampung dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan kampung. Selanjutnya kelembagaan yang dianggap memiliki pengaruh besar didalam masyarakat BAPEKam karena dianggap berperan sebagai pengawas kinerja pemerintahan kampung.

Beberapa lembaga yang memiliki kedekatan dengan masyarakat namun tidak memiliki peran besar dalam penentu pembangunan kampung secara umum diantaranya adalah PKK, Gapoktan, Karang Taruna dan lainnya. Adapun diagram Venn kedekatan kelembagaan dengan masyarakat disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 30. Diagram Venn pengaruh dan kedekatan kelembagaan di Kampung Mengkapan



Sumber: Wawancara

8.2. Organisasi Sosial Nonformal

Organisasi sosial non formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tanpa terikat dengan kepengurusan secara legal. Dalam organisasi sosial non formal sarana membentuk dan memilih kepengurusan adalah melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan melengkapi dengan berbagai syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu yang diarahkan mencapai tujuan pembentukan organisasi. Selain organisasi sosial non formal tersebut terdapat juga organisasi sosial non formal di Kampung Mengkapan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Organisasi Sosial Nonformal di Kampung Mengkapan

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Majelis Taklim	2	Kelompok
2	Wirid Yassin	3	Kelompok
3	Arisan	8	Kelompok
4	Pengajian	4	Kelompok
5	Remaja Mesjid	2	Kelompok

Sumber: Wawancara

Secara umum hampir keseluruhan masyarakat terlibat aktif dalam organisasi sosial non formal yang ada di Kampung Mengkapan. Terutama pada momen perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, MTQ dan lain-lainnya. Organisasi sosial non formal yang ada di Kampung Mengkapan menjadi media mempererat silaturahmi antar masyarakat.

8.3. Jejaring Sosial

Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa. Jejaring sosial desa ini

merupakan pengembangan kerjasama yang menghubungkan antar desa dalam kepentingan yang sama. Di Kecamatan Teluk Meranti, khususnya di Desa Petodaan terdapat kerjasama dengan wilayah desa-desa lain yang membentuk pertalian hubungan dalam kepentingan tertentu.

Terdapat kerjasama antara Gapoktan Kampung Mengkapan dengan Kelompok Tani di Kampung Bunga Raya. Kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan akses pupuk subsidi untuk petani di Kampung Mengkapan. Jejaring ini dibangun untuk memberikan solusi atas kelangkaan pupuk di Kampung Mengkapan.

Selain itu telah dibangun komunikasi awal dengan Kampung Pusako dalam pengelolaan bersama wilayah TORA. Masyarakat Mengkapan yang mendapatkan program TORA di Kampung Pusako akan bekerja sama dalam pengelolaan wilayahnya. Dalam pertemuan pembahasan kerjasama belum disepakati komoditas yang akan dikembangkan. Untuk mengelola kawasan dibentuk kelompok pengelola di bawah naungan Kampung Pusako.

Bab IX Perekonomian

9.1. Pendapatan dan Belanja Kampung

Total anggaran pendapatan dana Kampung Mengkapan tahun 2019-2020 adalah Rp2.629.982.000,00. Penyusunan penggunaan anggaran mengacu pada Permendes PD TT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Namun mengalami perubahan pada April 2020 untuk penyusuaian dengan Permendes PD TT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, dimana perubahan tersebut adalah untuk menyikapi dampak wabah covid-19.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut secara umum arah pengelolaan pendapatan kampung tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, perubahan yang mencolok adalah pada prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dampak wabah covid-19. Berikut ini disajikan tabel sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran dana Kampung Mengkapan tahun 2019-2020.

Tabel 32. Rekapitulasi Pendapatan Kampung Mengkapan tahun 2019-2020

No	Jenis Pendapatan	Jumlah	Sumber
1.	Alokasi Dana Kampung	Rp 864.247.000,00	APBD
2.	Dana Kampung	Rp 1.080.182.000,00	APBN
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 81.113.000,00	Bagi Hasil Pajak Daerah
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 200.000.000,00	Provinsi
Total Pendapatan Dana Kampung		Rp 2.225.542.000,00	

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan

Tabel 33. Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Kampung Mengkapan tahun 2019-2020

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Sumber
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Rp 968.324.700,00	Pendapatan Dana Kampung
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp 416.639.000,00	Pendapatan Dana Kampung
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 100.600.000,00	Pendapatan Dana Kampung
5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 240.000.000,00	Pendapatan Dana Kampung
7.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kampung	Rp 417.600.000,00	Pendapatan Dana Kampung
Total Pengeluaran Dana Kampung		Rp 2.143.163.700,00	

Sumber: Pemerintah Kampung Mengkapan

9.2. Aset Kampung

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau perolehan hak lainnya yang sah (termasuk hibah dan hasil kerjasama desa). Aset desa bisa barang bergerak (contoh: alat pemadam kebakaran; alat pemotong kayu) dan tidak bergerak (contoh: tanah kas desa, pasar desa, gedung balai pertemuan milik desa, hutan milik desa, sarana pemandian umum). Rincian aset Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 34. Aset Kampung Mengkapan

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PEMBUATAN	NILAI (RP)	MERK/TIPE	SUMBER	KONDISI		
							B	RR	RB
1	KURSI TAMU	1 SET							√
2	TANAH KUBURAN	1				HIBAH MASYARAKAT	√		
3	TANAH SEPAK BOLA	1				HIBAH MASYARAKAT			√
5	MDA	1	2000			SUMSIDI BBM		√	
6	SEKOLAHAN	1	2002				√		
7	KANTOR DESA LAMA	1	2005			PERUSAHAAN			√
8	KURSI RAPAT LAMA	15 BUAH	2011		NAPOLY	ADD			√
9	PAPAN MONOGRAFI	5 BUAH	2011			ADD			√
10	TIMBANGAN BAYI	1 BUAH	2011						√
11	TIMBANGAN DEWASA	1 UNIT	2011			MILIK SENDIRI			√
12	DISPENSER	1 UNIT	2012		MIYAKO	ADD			√
13	POMPA AIR	1 UNIT	2012		SANYO	ADD			√
14	TANGKI AIR	1 UNIT	2012		NAPOLY	ADD			√
15	GORDEN	1 SED	2012			DD			√
16	GORONG – GORONG	4 UNIT	2012			PNPM		√	
17	BOX COVER	2 UNIT	2012			PNPM		√	
18	BOX COVER	1 UNIT	2012			PNPM		√	
19	POMPA AIR	1 UNIT	2012			DINAS			√
20	POMPA AIR	2 UNIT	2012			DINAS			√
21	PARALON	20 BATANG	2012			DINAS			√
22	TANAH LAPANGAN BOLA VOLY	1	2012			HIBAH MASYARAKAT		√	
23	POSYANDU	1	2013						√
24	TANAH PERSAWAHAN	1	2013			TANAH	√		

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PEMBUATAN	NILAI (RP)	MERK/TIPE	SUMBER	KONDISI		
							B	RR	RB
						MASYARAKAT			
25	TERPAL	5 BUAH	2013			DINAS			√
26	ABIL	20 UNIT	2013			DINAS			√
27	BOX COVER	1 UNIT	2013			PPIDK		√	
28	BOX COVER	1 UNIT	2013			PPIDK		√	
29	JALAN Pengeras Beton	2 UNIT	2013			PPIDK			√
30	KERAMIK LANTAI	150 KOTAK	2013			PERUSAHAAN	√		
31	KURSI RAPAT	30 BUAH	2014			ADD		√	
32	PENIMBUNAN	1	2014			PPIDK	√		
33	PENIMBUNAN	1	2014		GARUDA	PPIDK	√		
34	Pengeras Beton	1	2014		NAPPOLY	PPIDK	√		
35	GORONG – GORONG	1	2014		701 M	PPIDK	√		
36	Pengeras Beton	1	2014		59 M	PNPM	√		
37	Pengeras Beton	1	2014			PPIDK	√		
38	Pengeras Beton	1	2014			PPIDK	√		
39	LAPTOP	2 UNIT	2015	14.000.000	ASUS, ACER	ADD			√
40	KURSI PLASTIK	30 BH	2015	2.100.000	NAPPOLY	ADD		√	
41	KAMERA DIGITAL	1 UNIT	2015	3.600.000	CANON	ADD	√		
42	MEJA	5 UNIT	2015	2.500.000		ADD		√	
43	KOMPUTER	1 UNIT	2015	4.500.000	ACER	SILPA PROVINSI			√
44	PRINTER BROTHER	1 UNIT	2015	2.000.000	BROTHER	DD			√
45	PRINTER CANNON	1 BH	2015	700.000	CANON	ADD			√
46	LEMARI ARSIP 3 PINTU	1 UNIT	2015	1.600.000		SILPA PROVINSI		√	
47	KURSI POLARIS	20 UNIT	2015	7.000.000	POLARIS	SILPA PROVINSI	√		
48	KURSI SOFA	1 UNIT	2015	3.750.000	ISET	SILPA PROVINSI	√		
49	TENDA 5X6	1 UNIT	2015	13.000.000	5 x 6	SILPA PROVINSI		√	

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PEMBUATAN	NILAI (RP)	MERK/TIPE	SUMBER	KONDISI		
							B	RR	RB
50	GINSET YANMAR	1 UNIT	2015	43.000.000	YANMAR	SILPA PROVINSI			√
51	KIPAS ANGIN TORNADO	1 BH	2015	1.500.000	REGENCY	SILPA PROVINSI	√		
52	PINTU TERALIS	3 LEMBAR	2015	3.750.000		SILPA PROVINSI	√		
53	TV LED 32	1 UNIT	2015	5.400.000	SHARP	SILPA PROVINSI	√		
54	PARABOLA 4 LNB	1 UNIT	2015	1.500.000	MATRIX	SILPA PROVINSI			√
55	DAP SANYO	1 UNIT	2015	1.000.000	SANYO	SILPA PROVINSI			√
56	UMBUL – UMBUL	40 LEMBAR	2015	4.000.000		SILPA PROVINSI			√
57	PROYEKTOR INFOKUS	1 UNIT	2015	6.000.000		SILPA PROVINSI	√		
58	TIANG BENDERA	1 UNIT	2015	5.000.000		SILPA PROVINSI	√		
59	BAK AIR WC	1 UNIT	2015	600.000		DD	√		
60	SEMENISASI JALAN DESA	105 M	2015	232.334.000	4 x 0.20 x 105 M	ADD	√		
61	POS KAMLING	1 BUAH	2015	14.110.000		PPIDK/ADD	√		
62	SEMENISASI JALAN DESA	300 M	2015	500.000.000	4 x 0.20 x 300 M	PERUSAHAAN	√		
63	PAVING BLOK	1 PAKET	2016			ASPIRASI DPRD	√		
64	MESIN PEMADAM KEBAKARAN	1 UNIT	2016	60.000.000		SILPA PROVINSI	√		
65	PEMBANGUNAN SEMENISASI	1 PAKET	2016	596.634.000	4 x 0.20 x 406 M	DD	√		
66	PEMBANGUNAN SEMENISASI	1 PAKET	2016	233.921.000	4 x 0.20 x 103 M	SILPA PROVINSI	√		
67	PEMBANGUNAN TURAP	1 PAKET	2016	314.518.000		ADD	√		
68	PEMBANGUNAN GORONG – GORONG	2 PAKET	2016	27.952.000		ADD	√		
69	PEMBANGUNAN BOX COVER	1 PAKET	2016	107.530.000		ADD	√		
70	PEMBANGUNAN GORONG – GORONG	2 PAKET	2016	24.000.000		SILPA PROVINSI	√		
71	LAPTOP	2 UNIT	2017	14.000.000	HP	ADD	√		
72	KURSI TUNGGU	1 SET	2017	6.000.000		ADD	√		
73	GORDEN	1 SET	2017	775.000		ADD		√	
74	MESIN RUMPUT	1 UNIT	2017	1.500.000		ADD	√		

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PEMBUATAN	NILAI (RP)	MERK/TIPE	SUMBER	KONDISI		
							B	RR	RB
75	BADAN JALAN	1 PAKET	2017	83.020.000	870 M	DD	√		
76	BADAN JALAN	1 PAKET	2017	163.281.000	1350 M	ADD	√		
77	BOX COULVER	1 PAKET	2017	76.232.000		DD	√		
78	BOX COULVER	1 PAKET	2017	140.280.400		ADD	√		
79	JEMBATAN BATU	1 PAKET	2017	565.708.000		DD	√		
80	GPS	1 UNIT	2017	8.000.000		ADD	√		
81	PRINTER CANNON	2 UNIT	2017	1.700.000		ADD	√		
82	GORONG – GORONG	1 UNIT	2017	25.355.400		ADD	√		
83	KIPAS ANGIN	1 UNIT	2017	900.000		ADD	√		
84	PLAT NAMA DESA	4 BH	2017	6.000.000		ADD	√		
85	BOX COULVER	1 UNIT	2018	39.207.600	3m x 6m x 2m	ADD	√		
86	GORONG – GORONG	1 UNIT	2018	14.301.100	40cm	ADD	√		
87	OPRIT JALAN	1 UNIT	2018	21.055.700	10m x 4m x 0.20m	PROVINSI	√		
88	BOX COULVER	1 UNIT	2018	30.496.700	1.4m x 5m x 1.3m	PROVINSI	√		
89	SEMENISASI JALAN	1 PAKET	2018	48.467.400	69m x 2.20m x 0.15m	PROVINSI	√		
90	BADAN JALAN PRODUKSI	1 PAKET	2018	100.876.500	800m x 7m	ADD	√		
91	TIMBUNAN BADAN JALAN	1 PAKET	2018			ADD	√		
92	LEMARI BESI	1 BUAH	2018	7.000.000		ADD	√		
93	LAPTOP	1 BUAH	2018	7.000.000	ASUS	ADD	√		
94	KOMPOR/TABUNG GAS	1 PAKET	2018	3.000.000	RINNAI	ADD	√		
95	HARDDISK	1 BUAH	2018	1.200.000	TOSHIBA	ADD	√		
96	BATRAI	1 BUAH	2018	900.000		ADD			√
97	POT BUNGA	10 BUAH	2018	5.000.000		ADD	√		
98	MEJA KANTOR	1 BUAH	2018	1.500.000		ADD	√		
99	TMPT HIDANGAN MAKANAN	3 BUAH	2018	3.250.000		ADD	√		

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PEMBUATAN	NILAI (RP)	MERK/TIPE	SUMBER	KONDISI		
							B	RR	RB
100	PIRING	5 LUSIN	2018	1.750.000		ADD	√		
101	PRINTER	1 BUAH	2019	2.000.000	CANON MP 287	ADD	√		
102	MEJA KANTOR	3 BUAH	2019	6.300.000	VIP	ADD	√		
103	MEJA RAPAT	1 BUAH	2019	3.500.000	VIP	ADD	√		
104	TANGKI AIR	1 BUAH	2019	1.750.000	POLY TANK	ADD	√		
105	WESTAPEL	1 BUAH	2019	700.000		ADD	√		
106	LESIVER	1 BUAH	2019	450.000	MATRIX BURGER	ADD	√		
107	LEMARI ARSIP	1 UNIT	2019	3.500.000		ADD	√		
108	BATRAI	1 UNIT	2019	1.950.000	INCOE	ADD	√		
109	INVENTER 1000 W	1 BUAH	2019	750.000	SOOER	ADD	√		
110	RAK PIRING	1 UNIT	2019	1.350.000		ADD	√		
111	DISPENSER	1 BUAH	2019	3.500.000	MIYAKO	ADD	√		
112	TENDA 4X6	2 UNIT	2019	17.000.000		ADD	√		
113	MESIN RUMPUT	1 UNIT	2019	1.700.000		ADD	√		
114	SEMENISASI JALAN	1 UNIT	2019	64.074.100	168x1x0.2 m	DD	√		
115	SEMENISASI JALAN	1 UNIT	2019	33.099.000	209x0.5x0.15	DD	√		
116	LADANG HASIL PANEN DAN ALAT" PERTANIAN	1 UNIT	2019	167.225.300	7x10 m	DD	√		
117	BOX COULVER	1 UNIT	2019	73.248.000	2.5x5x1.7 m	DD	√		
118	SEMENISASI HALAMAN KANTOR	1 UNIT	2019	32.891.600	17x3.5 m	ADD	√		
119	PELATARAN KANTOR DESA		2019		30.5x1 m		√		
120	BOX COULVER	1 UNIT	2019	73.248.000	2.5x5x1.7 m	ADD	√		
121	GEDUNG PAUD	1 UNIT	2019	204.617.000	10x8 m	ADD	√		
122	BOX COULVER	1 UNIT	2019		2.5x5x1.7 m	DD	√		
123	PENIMBUNAN BADAN JALAN	1 UNIT	2019	401.883.000	790x5.70 m	DD	√		
124	LAPTOP	2 UNIT	2019	14.000.000	HP	PBP	√		
125	PRINTER	1 UNIT	2019	2.500.000	EPSON	PBP	√		

NO.	NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PEMBUATAN	NILAI (RP)	MERK/TIPE	SUMBER	KONDISI		
							B	RR	RB
126	LAPTOP	1 UNIT	2019	7.000.000	HP	ADD	√		
127	TERMOS NASI	3 BUAH	2019	1.470.000		ADD	√		
128	WAJAN	1 BUAH	2019	875.000		ADD	√		

9.3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Kampung Mengkapan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Rata-rata masing-masing petani memiliki 2 hektare lahan perkebunan kelapa sawit. Setiap 2 hektare lahan perkebunan sawit mampu menghasilkan 2 hingga 4 ton buah sawit. Karena di Kampung Mengkapan tidak terdapat pabrik kelapa sawit, sehingga buah sawit tersebut dijual kepada toke atau ram yang ada di kampung. Harga jual buah sawit kepada toke atau ram berkisar antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram, tergantung dari jenis buah (umur kepala sawit) dan harga pasaran. Dengan demikian dapat diperkirakan pendapatan petani kelapa sawit perbulan adalah Rp3.000.000 hingga Rp6.000.000 per bulannya.

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Buton di Kampung Mengkapan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Dampak tersebut salah satunya adalah membuka peluang kerja bagi masyarakat sebagai buruh angkut di pelabuhan. Belum ada data yang menunjukkan jumlah masyarakat Kampung Mengkapan yang mengandalkan hidup dari bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sebagian buruh angkut yang bekerja di pelabuhan memang ada yang merupakan mata pencaharian pokok dan ada juga yang menjadikannya mata pencaharian tambahan. Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang menjadikan buruh angkut di pelabuhan sebagai mata pencaharian pokok, rata-rata pendapatan perhari buruh angkut berkisar antara Rp80.000 hingga Rp150.000.

Keberadaan Pelabuhan Tanjung Buton juga memberikan dampak terhadap pendapatan pedagang yang ada di Kampung Mengkapan. Karena Pelabuhan Tanjung Buton merupakan salah satu pelabuhan penumbang terbesar di Provinsi Riau dengan pengguna jasa yang cukup tinggi sehingga hal ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dengan membuka usaha warung kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang kecil yang ada di sekitar pelabuhan, pada kondisi hari biasa mereka bisa memperoleh pendapatan kotor Rp100.000 hingga Rp300.000 perhari. Jika pada musim libur panjang terutama libur lebaran mereka bisa memperoleh pendapatan Rp500.000 hingga Rp800.000 perhari.

Supir angkutan, akibat tingginya mobilitas pengguna jasa transportasi angkutan laut dari berbagai daerah terutama dari dan akan menuju Pekanbaru sehingga kebutuhan jasa transportasi secara tidak langsung di Kampung Mengkapan meningkat. Hal ini membuka peluang kerja bagi masyarakat sebagai supir angkutan umum rute Pelabuhan Tanjung Buton – Pekanbaru atau yang biasa di sebut travel. Biaya yang dikenakan bagi pengguna jasa travel ini adalah Rp100.000 hingga Rp120.000 per orang dengan kapasitas mobil bermuatan 7 orang. Sehingga dengan demikian perkiraan pendapatan supir angkutan umum adalah Rp700.000 hingga Rp840.000 per trip nya, ini bukanlah pendapatan bersih karena supir harus membagi hasil pendapatan tersebut kepada pemilik kendaraan setelah dikurangi biaya operasional (BBM). Selain itu, travel tidak beroperasi setiap hari, kalau hari biasa bukan hari libur paling tidaknya hanya beroperasi 3 kali dalam seminggu.

9.4. Industri dan Pengolahan

Hampir tidak ditemukan industri dan pengolahan di Kampung Mengkapan baik skala besar maupun skala rumah tangga. Akan tetapi terdapat satu unit kilang sagu mini yang dikelola oleh perorangan, kilang sagu ini masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi. Pemilik kilang sagu adalah salah satu dari warga Kampung Mengkapan.

Gambar 31. Kilang Sagu Mini di Kampung Mengkapan



Sumber: Observasi lapangan

9.5. Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Jenis komoditas unggulan di Kampung Mengkapan adalah kelapa sawit, rata-rata produksi kelapa sawit per kapling (2 hektare) adalah 3-4 ton per bulan dengan harga berkisar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Pemanfaatan komoditas tersebut oleh masyarakat untuk pemenuhan hidup sehari-hari dengan dijual kepada toke atau ram. Kendala yang dihadapi masyarakat untuk perkebunan kelapa sawit ini adalah harga pupuk yang tinggi, rawan terjadi kebakaran lahan jika musim kemarau serta status lahan yang berkonflik.

Sebelum mengenal kelapa sawit, masyarakat Kampung Mengkapan menjadikan perkebunan karet dan sagu sebagai komoditas unggulan. Namun seiring berjalannya waktu kedua jenis komoditas tersebut mulai ditinggalkan dan beralih ke komoditas kelapa sawit. Hal ini disebabkan komoditas kelapa sawit lebih menjanjikan dibanding karet dan sagu, selain itu dari segi pengelolaan dan pemasaran dianggap lebih mudah.

Penuturan masyarakat untuk komoditas karet dahulu ketika harga karet di angka Rp3.000 per kilogram harga beras pada saat itu Rp1.500 per kilogram. Jadi, satu kilo karet yang dihasil bisa ditukar dengan 2 kilogram beras. Ini sangat jauh berbeda dengan situasi sekarang, saat ini harga karet per kilogram Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogram sedangkan harga beras Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram sehingga dibutuhkan 2 kilogram karet untuk mendapatkan 1 kilogram beras. Hal ini membuat masyarakat semakin kehilangan minat untuk menjadikan karet sebagai komoditas andalan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.

Sedangkan komoditas sagu, jangka waktu tanam sagu hingga pemanenan dibutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun. Sehingga sagu tidak dapat dijadikan andalan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Kampung Mengkapan mulai menanam nenas sejak tahun 2013, setelah terpengaruh oleh beberapa kampung yang telah sukses terlebih dahulu dengan komoditas nenas seperti Kampung Penyengat dan Kampung Tanjung Kuras. Semenjak itu masyarakat Kampung Mengkapan juga mulai ikut mengembangkan pertanian nenas, namun karena minimnya pengalaman dalam pertanian nenas sehingga hasilnya belum maksimal.

Kampung Mengkapan memiliki kawasan objek ekowisata mangrove dan ini merupakan objek wisata pertama kali yang ada di Kabupaten Siak. Objek wisata ini pernah populer dan menjadi ikon ekowisata mangrove di Kabupaten Siak. Namun hingga saat ini kepopuleran ekowisata mangrove

Mengkapan mulai menurun karena sudah mulai banyak kampung-kampung yang lain juga mengembangkan ekowisata mangrove.

Tabel 35. Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut di Kampung Mengkapan

Komoditas	Potensi	Masalah
Kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perkebunan sawit yang cukup luas • Minat masyarakat tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi yang dihasilkan masih rendah • Sebagian besar lahan perkebunan berkonflik
Karet	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sudah terbiasa dengan tanaman karet, karena karet sudah menjadi komoditas andalan sejak zaman dahulu • Cocok dengan lahan gambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi yang dihasilkan masih rendah, karena bibit karet kampung bukan unggul • Harga rendah • Lahan perkebunan dialih fungsikan menjadi kelapa sawit • Minat masyarakat rendah
Sagu	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sudah terbiasa dengan tanaman sagu, karena karet sudah menjadi komoditas andalan sejak zaman dahulu • Cocok dengan lahan gambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan perkebunan dialih fungsikan menjadi kelapa sawit • Minat masyarakat rendah • Waktu panen lama
Nenas	<ul style="list-style-type: none"> • Cocok dengan lahan gambut • Bisa dikombinasikan dengan tanaman lain • Minat masyarakat tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman masyarakat masih rendah karena baru mulai bertani nenas sejak 2017 • Persaingan tinggi dengan kampung sekitar yang telah lebih dahulu menanam nenas
Ekowisata mangrove	Sudah terbangun	<ul style="list-style-type: none"> • Peminat mulai berkurang karena mulai banyak kampung lain juga membangun ekowisata mangrove • Sulit melakukan pengembangan karena lahan mangrove dikuasai perorangan

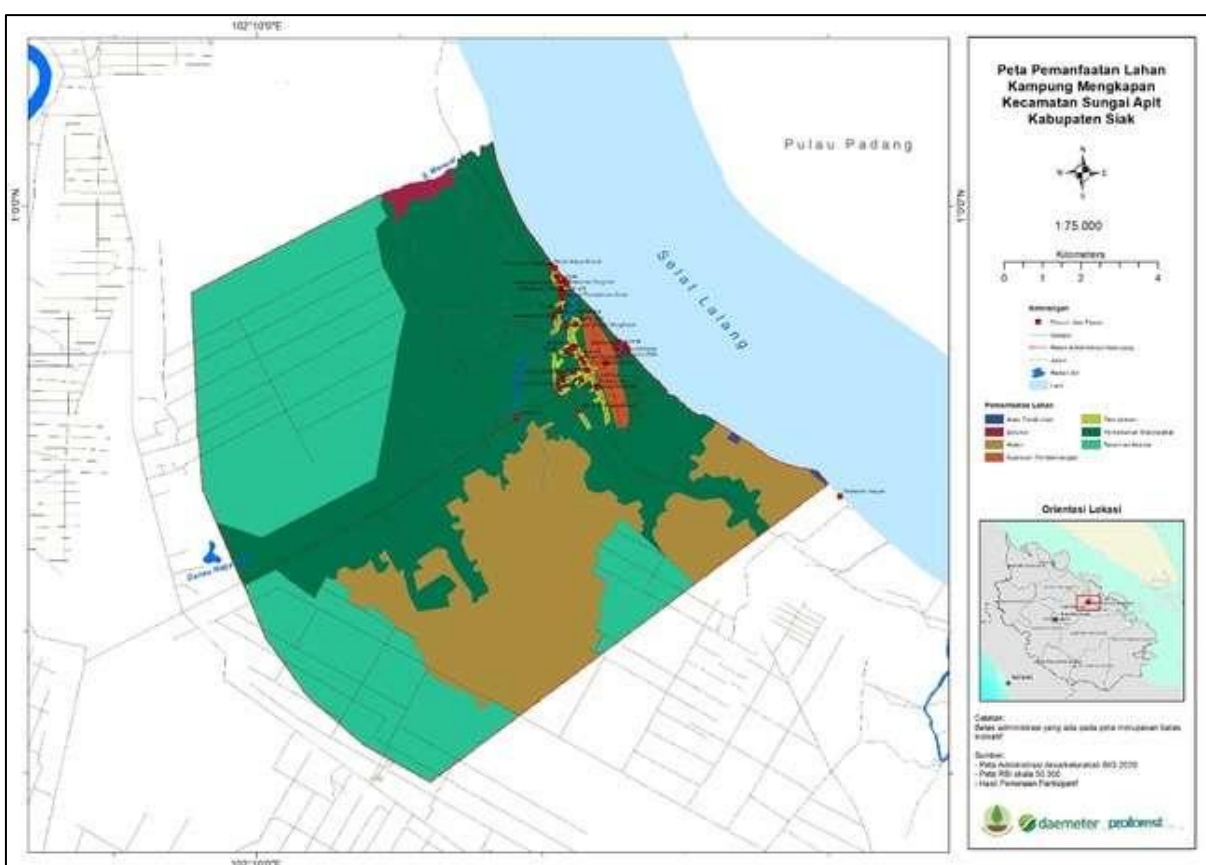
Sumber: Wawancara

Bab X Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

10.1. Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif pemanfaatan lahan di Kampung Mengkapan diketahui bahwa pemanfaatan lahan terbesar adalah tanaman akasia sebesar 37,5% dengan luas 5.696,4 hektare, perkebunan masyarakat sebesar 36,9% dengan luas 5.605,7 hektare, hutan sebesar 23,4% dengan luas 3.549,4 hektare, pemukiman sebesar 1% dengan luas 151,4 hektare, kawasan pertambangan sebesar 1% dengan luas 151,3 hektare, dan areal pelabuhan sebesar 0,1% dengan luas 22,0 hektare. Secara rinci luasan pemanfaatan lahan di Kampung Mengkapan disajikan sebagai berikut:

Gambar 32. Peta Pemanfaatan Lahan Kampung Mengkapan tahun 2019



Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif

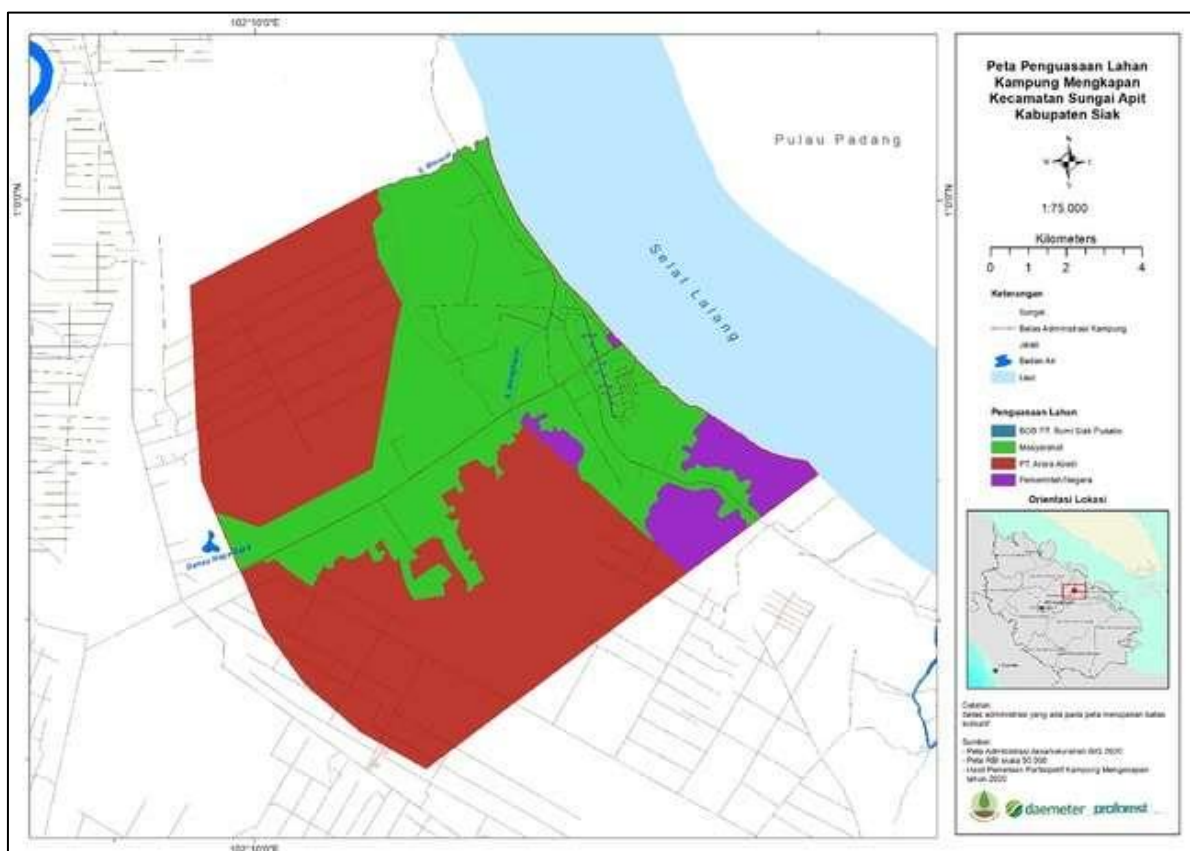
Tabel 36. Pemanfaatan Lahan Kampung Mengkapan

Pemanfaatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Area Pelabuhan	22,0	0,1
Hutan	3.549,4	23,4
Kawasan Pertambangan	151,3	1,0
Pemukiman	151,4	1,0
Perkebunan Masyarakat	5.605,7	36,9
Tanaman Akasia	5.696,4	37,5
Total	15.176,2	100

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif

10.2. Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Gambar 33. Peta Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan Berdasarkan Hasil Pemetaan Partisipatif



Sumber: Hasil Pengolahan Data Pemetaan Partisipatif

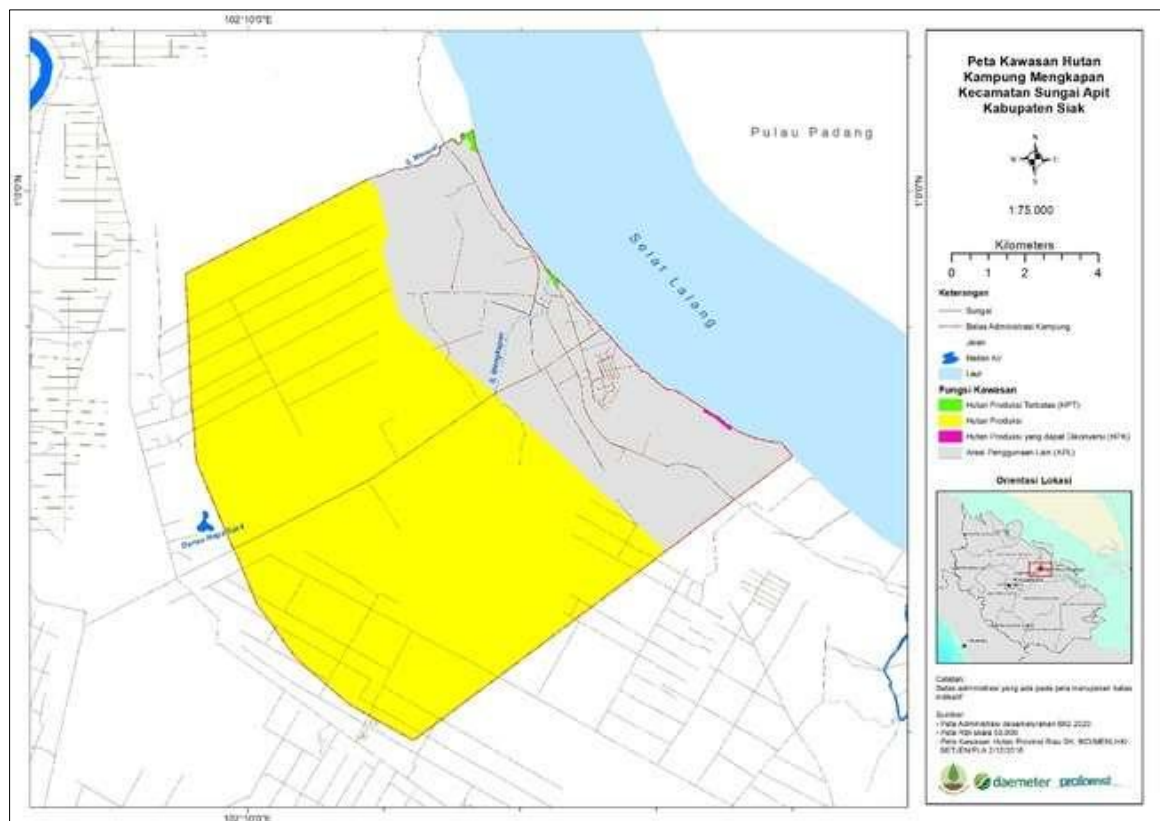
Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif penguasaan lahan dapat dilihat penguasaan lahan terbesar di Kampung Mengkapan adalah PT. Arara Abadi dengan luasan sebesar 8.354,1 hektare dan kondisi eksisting lahan adalah tanaman Akasia. Penguasaan lahan terbesar selanjutnya adalah masyarakat dengan luas lahan yang dikuasai adalah 5.929,6 hektare dan kondisi eksisting lahan yang terdiri dari pemukiman, perkebunan kelapa sawit, karet, sagu dan semak belukar, namun didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Selain terdapat lahan yang penguasaannya oleh negara/pemerintah yang meliputi areal pelabuhan dan areal yang masih belum dikelola/masih terdapat tutupan hutan dengan luasan diperkirakan sebesar 869,8 hektare dan areal sumur minyak milik Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako (BSP) seluas sekitar 22,5 hektare. Berikut ini disajikan tabel dan peta hasil pemetaan partisipatif penguasaan lahan di Kampung Mengkapan.

Tabel 37. Peta Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan Berdasarkan Hasil Pemetaan Partisipatif

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	BOB PT. Bumi Siak Pusako	22,5
2	Masyarakat	5.929,6
3	Pemerintah/Negara	869,8
4	PT. Arara Abadi	8.354,1

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pemetaan Partisipatif

Gambar 34. Peta Kawasan Hutan di Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Peta Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Riau yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kehutanan pada nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dapat dilihat bahwa sekitar 70% dari lahan yang ada di wilayah administrasi Kampung Mengkapan adalah Kawasan Hutan. Secara aturan Kawasan Hutan adalah areal yang kewenangannya ada diKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga bagi pihak yang ingin melakukan pengelolaan pada Kawasan Hutan harus mendapatkan persetujuan dari KLHK. Rincian luasan Kawasan Hutan di Kampung Mengkapan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 38. Luasan Kawasan Hutan di Kampung Mengkapan

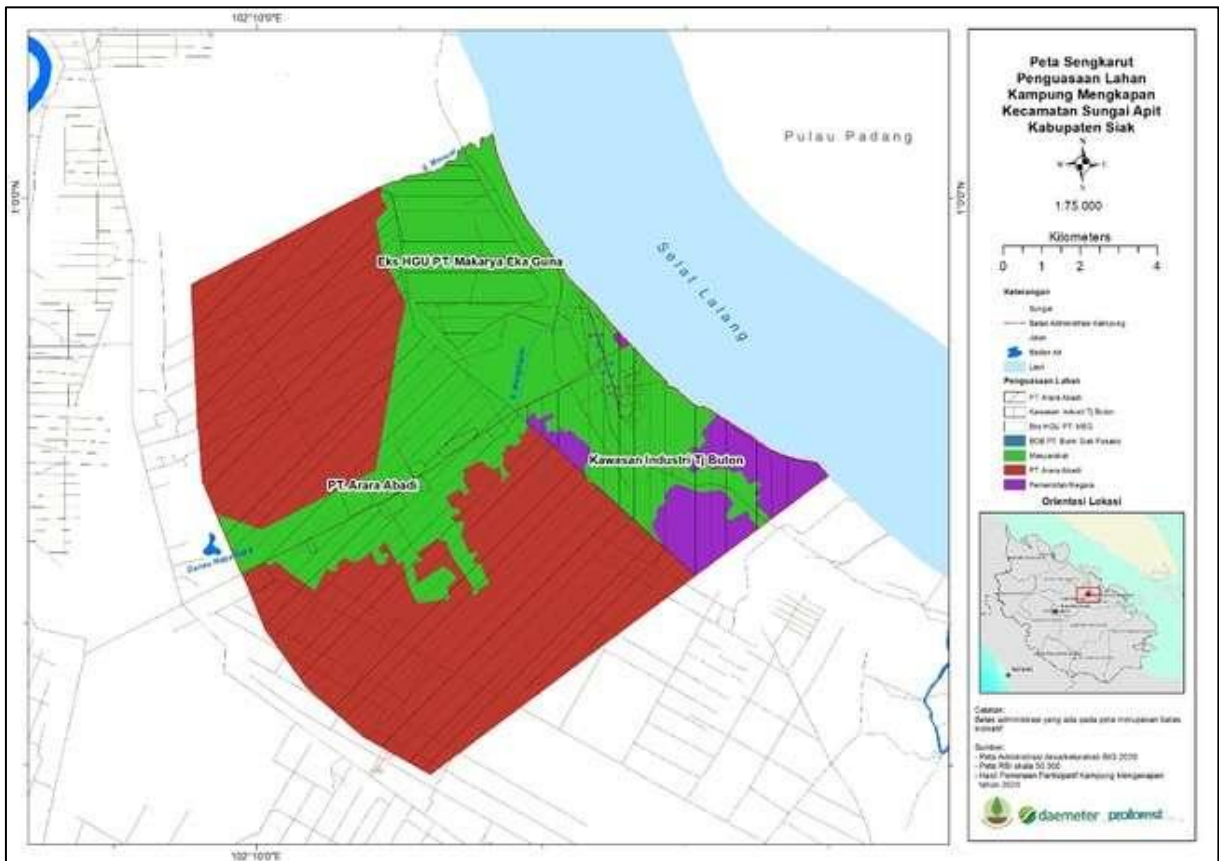
No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	18,7
2	Hutan Produksi (HP)	10.649,5
3	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	6,9
4	Area Penggunaan Lainnya (APL)	4.500,4

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dapat dilihat pada tabel luasan kawasan hutan di Kampung Mengkapan dapat diketahui bahwa luas lahan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) di Kampung Mengkapan adalah 10.649,5 hektare dimana 98% penguasaannya adalah PT. Arara Abadi yaitu seluas 10.471,7 hektare. Sementara untuk lahan non kawasan hutan atau lahan dengan fungsi Areal Peruntukan Lainnya (APL) yang terdapat di Kampung Mengkapan seluas 4.500,4 hektare, 1.191,1 diantaranya adalah areal perzinan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Makarya Eka Guna (MEG) sejak tahun 1999 yang kemudian telah dicabut izinnya pada tahun 2018, dengan demikian penguasaan areal tersebut dikembalikan ke pemerintah bukan lagi pihak perusahaan. Sedangkan 2.273,6 hektare lahan dengan fungsi APL lainnya adalah Kawasan Industri Tanjung Buton yang telah di tetapkan oleh Bupati Siak melalui

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 7 tahun 2014, sehingga areal tersebut penguasaannya adalah Pemerintah. Dengan demikian hanya tersisa sekitar 1.035,7 hektare lahan non kawasan hutan yang seharusnya penguasaannya oleh masyarakat. Untuk lahan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 18,7 hektare dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 6,9 hektare yang ada di Kampung Mengkapan masih belum terdapat perzinan di atasnya sehingga penguasaannya masih dikuasai oleh pemerintah.

Gambar 35. Peta Sengkarut Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan



Sumber: Hasil Pengolahan Data Pemetaan Partisipatif

Tabel 39. Hasil Telaah Sengkarut Penguasaan Lahan di Kampung Mengkapan

No	Penguasaan Aktual	Status penguasaan	Luas (Ha)
1	Masyarakat	Kawasan Industri Tanjung Buton	1.396,0
2	Masyarakat	Eks HGU PT. MEG	1.190,2
3	Masyarakat	PT. Arara Abadi	2.287,8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pemetaan Partisipatif

Jika di telaah lebih lanjut mengenai penguasaan lahan berdasarkan perizinan dan peraturan dengan penguasaan hasil pemetaan partisipatif, maka sangat jelas terlihat bahwa terdapat tumpang tindih antara perizinan yang ada dengan penguasaan lahan di lapangan. Berdasarkan pengamatan hasil tumpang susun antara peta penguasaan berdasarkan perizinan dengan peta penguasaan lahan hasil pemetaan partisipatif ditemukan bahwa sekitar 2.287,8 hektare lahan Konsesi PT. Arara Abadi dikuasai oleh masyarakat, sekitar 1.396,0 hektare lahan kawasan industri tanjung buton dikuasai oleh masyarakat dan secara keseluruhan lahan eks HGU PT. MEG juga telah dikuasai oleh masyarakat.

10.3. Penguasaan Parit/Kanal di Lahan Gambut

Sudah dijelaskan pada sub bab 10.2 bahwa penguasaan lahan gambut maupun non gambut yang ada di Kampung Mengkapan sebagian besarnya dikuasai oleh pihak swasta dan pemerintah. Sehingga hampir secara keseluruhan kanal atau parit yang ada di Kampung Mengkapan dibangun dan dikuasai oleh PT. Arara Abadi. Karena pemanfaatan lahan gambut yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi adalah untuk kebutuhan industri bubur kayu dan kertas dengan jenis tanaman akasia tentunya pengelolaan yang dilakukan menggunakan sistem kanalisasi dengan membangun kanal/atau parit dengan jumlah yang banyak.

10.4. Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Peralihan hak atas tanah di Kampung Mengkapan dilakukan dengan beberapa mekanisme yakni jual-beli, hibah dan sistem pembagian warisan dalam keluarga serta wakaf. Peralihan hak atas tanah melalui mekanisme jual-beli merupakan yang paling umum terjadi sehingga saat ini sebagian lahan lahan yang terdapat di Kampung Mengkapan kepemilikannya ada masyarakat yang berasal dari luar kampung. Jual-beli lahan yang terjadi umumnya untuk perkebunan sawit. Latar belakang jual-beli lahan umumnya dilakukan karena adanya kebutuhan finansial yang mendesak dengan jumlah yang cukup besar. Peralihan hak atas tanah lainnya yaitu dengan mekanisme hibah dan wakaf. Hibah dilakukan apabila hak atas tanah akan diberikan kepada sanak saudara atau kepada pihak tertentu seperti pemerintah untuk pembangunan sarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara wakaf secara prinsip diberikan secara sukarela oleh pemilik tanah untuk sarana peribadatan Islam yakni pembangunan mesjid atau mushola. Dalam sistem waris, hak atas tanah diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya untuk kemudian dijaga dan dikelola secara turun temurun. Kepemilikan suatu bidang tanah atas individu di umumnya menggunakan surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung, selanjut diserahkan kepada pemilik untuk melanjutkan ke pembuatan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan (BPN).

10.5. Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Jarang sekali ditemukan sengketa lahan yang terjadi di Kampung Mengkapan, apalagi sesama masyarakat Mengkapan. Konflik di lahan gambut yang masih terjadi hari ini justru antara masyarakat dengan perusahaan.

Bab XI Proyek Pembangunan Kampung

11.1. Program Pembangunan Kampung

Program pembangunan yang ada di Kampung Mengkapan merujuk pada penggunaan dana yang dikelola langsung oleh pemerintah desa (termasuk Alokasi Dana Desa/ADD). Program pembangunan tersebut dirumuskan pengelolaannya melalui musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) kampung yang melibatkan masyarakat kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam).

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Mengkapan Tahun 2020 – 2026, rencana kegiatan terbanyak berada pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Sub Bidang Pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan Infrastruktur Kampung dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp122.797.550.000,00. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat Kampung Mengkapan pada musrembang yang telah dilaksanakan pada April 2020.

Pada saat musrembang kesepakatan yang terbentuk adalah prioritas pada rencana pembangunan infrastruktur yang ada di kampung terutama pembangunan jalan karena jalan dianggap sebagai kebutuhan utama untuk peningkatan produktifitas masyarakat dengan mempermudah akses hingga ke lokasi-lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau sehingga pembangunan serta perkembangan perekonomian masyarakat untuk ke depannya akan lebih merata.

11.2. Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Kerjasama antara pemerintah kampung dengan pihak-pihak lain untuk menunjang program pembangunan yang ada di kampung pada saat ini adalah program kerjasama dukungan dari perusahaan yang terdapat di Kampung Mengkapan seperti Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako (BSP), PT. Kondur Petroleum S.A dan beberapa perusahaan eksportir cangkang kelapa sawit yang beroperasi di Kawasan Industri Buton. Dukungan dari pihak-pihak tersebut yang telah dilakukan di kampung selama ini berupa dukungan bantuan pembangunan infrastruktur kampung seperti jalan, masjid, ekowisata mangrove dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, dukungan lainnya juga ada yang berupa prosal yang diajukan oleh pemerintah kampung terhadap pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan kegiatan hari-hari besar seperti hari kemerdekaan, maulid nabi, MTQ dan lain-lain.

Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat. Yang mana hasil dari program tersebut terdiri dari sumur bor dan menara tangki air. Kegiatan ini dilakukan untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat.

Pada tahun 2020, CORE melakukan kegiatan *SPLP (Siak Pelalawan Landscape Program)* dan menepatkan melalui fasilitator desa untuk mengawal kegiatan SPLP di desa. Pada tahun 2021, WINROCK melakukan sekolah lapang budidaya sagu untuk pembuatan demplot dan kajian pengembangan pertanian hortikultura buah nanas.

Bab XII Persepsi Terhadap Restorasi Gambut

Untuk mendapat informasi tentang persepsi masyarakat terhadap restorasi gambut maka dilakukan wawancara terhadap perwakilan masyarakat seperti aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, petani, perwakilan kelompok perempuan, pemuda/pemudi dan pedagang (atau pelaku sektor jasa di desa) di Kampung Mengkapan yang bertujuan untuk penggalan data/informasi secara umum, pendapat serta pandangan tentang restorasi gambut. Berikut ini disajikan rekapitulasi hasil penggalan data/informasi yang dilakukan terhadap masyarakat.

Tabel 40. Persepsi Masyarakat Kampung Mengkapan Terhadap Restorasi Gambut

Pengetahuan Masyarakat	Penjelasan
Tentang restorasi gambut	Pengetahuan masyarakat tentang restorasi gambut sangat minim karena belum pernah ada sosialisasi dari pihak lain maupun perintah yang masuk ke kampung
Tentang pembasahan lahan gambut	Pengetahuan masyarakat tentang pembasahan lahan gambut demi pencegahan kebakaran sangat minim karena belum pernah dilakukan
Tentang tanaman yang cocok di lahan gambut	Pengetahuan masyarakat tentang tanaman yang cocok di lahan gambut sangat minim karena selama ini tidak penyuluhan atau informasi mengenai hal tersebut
Tentang proyek restorasi gambut yang pernah dilakukan	Pengetahuan masyarakat tentang restorasi gambut sangat minim karena belum pernah ada program dari pihak lain maupun perintah yang masuk ke kampung
Peluang keberhasilan program restorasi lahan gambut	Sangat memungkinkan karena sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung terhadap lahan perkebunan yang merupakan lahan gambut

Sumber: Wawancara

Berdasarkan hasil penggalan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap restorasi gambut, secara umum narasumber mengetahui hal tersebut. Namun jika melihat persepsi masyarakat Kampung Mengkapan secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat belum mengetahui karena belum pernah ada kegiatan sosialisasi terkait restorasi gambut yang pernah dilakukan di tingkat kampung. Adapun sosialisasi yang pernah dilakukan sejauh ini adalah di tingkat kabupaten atau kecamatan dengan melibatkan beberapa tokoh kampung terutama pemerintah kampung sehingga informasi mengenai restorasi tidak menyentuh hingga masyarakat secara keseluruhan.

Tentang pembasahan lahan gambut demi pencegahan kebakaran selama ini sama sekali belum pernah dilakukan di Kampung Mengkapan, baik oleh pemerintah kampung maupun dari pihak lain sehingga dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang pembasahan lahan gambut demi pencegahan kebakaran sangat minim. Padahal Kampung Mengkapan merupakan salah satu kampung yang rentan mengalami kebakaran.

Pengetahuan masyarakat tentang tanaman yang cocok untuk di lahan gambut sangat minim karena selama ini belum pernah ada sosialisasi dari pihak manapun. Masyarakat mengolah lahan gambut untuk pertanian maupun perkebunan berdasarkan pengalaman turun temurun dan berdasarkan pengamatan serta berbagi pengalaman dari kampung tetangga.

Hingga sekarang ini belum pernah ada proyek restorasi gambut yang pernah dilakukan di Kampung Mengkapan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

Jika seandainya ada program restorasi lahan gambut yang dilaksanakan di Kampung Mengkapan, masyarakat berpendapat bahwa keberhasilan program sangat memungkinkan karena sebagian besar kehidupan masyarakat bergantung terhadap lahan perkebunan yang merupakan lahan gambut tentunya ini menjadi motivasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta mencegah kebakaran.

Bab XIII Penutup

13.1. Kesimpulan

1. Kampung Mengkapan secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Secara astronomis terletak pada posisi koordinat $100^{\circ} 45'' - 100^{\circ} 52''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'' - 0^{\circ} 32''$ Lintang Utara. Secara geografis berada pada daerah pesisir pantai timur pulau Sumatera dan laut Selat Lalang dengan luas wilayah $\pm 15.175,8$ hektare.
2. Kampung Mengkapan secara topografi memiliki wilayah yang datar dan secara morfologi merupakan wilayah dataran rendah dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut beriklim iklim tropis dengan rata-rata suhu $26,3$ hingga $27,3$ °C dan curah hujan rata-rata 190-293 mm. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, namun terus menurun drastis selama 10 tahun terakhir. Berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawa dan pada wilayah KHG Sungai Siak - Sungai Kampar. Mengalami kebakaran pada awal tahun 2020 seluas ± 287 hektare.
3. Kampung Mengkapan terdiri atas 2 dusun, 5 Rukun Keluarga (RK/Setara RW), dan 15 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data kependudukan Kampung Mengkapan pada tahun 2020, jumlah keseluruhan penduduk adalah 3.066 jiwa yang terdiri 1.604 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.462 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 766.
4. Memiliki 65 orang tenaga pendidikan dan 2 orang tenaga kesehatan. Terdapat 7 fasilitas pendidikan dari jenjang PAUD, TK hingga SMP dan Memiliki 4 fasilitas kesehatan. Secara keseluruhan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Kampung Mengkapan dalam kondisi baik dan beroperasi dengan baik.
5. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun berapa berdirinya Kampung Mengkapan, namun berdasarkan penuturan tetua kampung, Kampung Mengkapan sudah ada sejak sekitar tahun 1911. Kampung Mengkapan didominasi oleh Suku Melayu sehingga bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan kepercayaan mayoritas yang dianut adalah agama Islam.
6. Secara resmi terbentuknya pemerintah Kampung Mengkapan pada tahun 1999, seiring dengan pemekaran Kabupaten Siak dari Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2000 dengan itu Kampung Mengkapan pertama kali melakukan sistem pemilihan kepala desa dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat yang terus berjalan hingga sekarang.
7. Keberadaan organisasi sosial formal yang memiliki peran dan manfaat terhadap masyarakat teridentifikasi bahwa terdapat 9 lembaga/organisasi sosial formal dan 19 kelompok lembaga sosial non formal di Kampung Mengkapan.
8. Total anggaran pendapatan dana Kampung Mengkapan tahun 2019-2020 adalah Rp2.629.982.000,00. Penyusunan penggunaan anggaran mengacu pada Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Namun mengalami perubahan pada April 2020 untuk penyesuaian dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, dimana perubahan tersebut adalah untuk menyikapi dampak wabah covid-19.

9. Sekitar 70% dari wilayah administrasi Kampung Mengkapan adalah Kawasan Hutan, 98% diantaranya penguasaannya adalah oleh PT. Arara Abadi, hanya tersisa 12% saja kawasan hutan yang belum berizin. 30% kawasan non hutan di Kampung Mengkapan atau 4.500,4 hektare, 50,5% diantaranya penguasaannya oleh Kawasan Industri Buton dan 26,5% nya lagi merupakan bekas HGU PT. MEG. Dengan demikian hanya tersisa 23% dari 4.500,4 areal non kawasan hutan yang tersisa.
10. Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Mengkapan Tahun 2020 – 2026, rencana kegiatan terbanyak berada pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Sub Bidang Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Kampung dengan rencana penggunaan anggaran sebesar Rp122.797.550.000,00. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat Kampung Mengkapan pada musrembang yang telah dilaksanakan pada April 2020.
11. Secara umum persepsi masyarakat terhadap restorasi gambut masih rendah.

13.2. Saran

1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai potensi Kampung Mengkapan
2. Perlu dilakukan alih pengetahuan mengenai kebijakan dalam pengelolaan ruang, kawasan hutan dan lahan gambut
3. Perlu melakukan pendampingan terhadap pemerintah kampung secara intens terkait program restorasi gambut
4. Perlu dilakukan pendampingan secara intens oleh pemerintah kampung maupun pihak ketiga terhadap konflik lahan yang ada di Kampung Mengkapan

LAMPIRAN

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Tahun 2020 – 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 41. Rekapitulasi Perkiraan Biaya Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Tahun 2020 - 2026

Bidang	Sub Bidang	Perkiraan Biaya	Perkiraan Sumber Dana
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung	Rp 3.960.947.040,00	APBKam
	Operasional Perkantoran	Rp 340.939.800,00	APBKam
	Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan kantor Kampung	Rp 350.516.450,00	APBKam
	Penetapan dan penegasan batas Kampung	Rp 180.000.000,00	APBKam/APBD
	Belanja Modal	Rp 290.376.000,00	APBKam
	Total		Rp 5.122.779.290,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan Infrastruktur Kampung	Rp 122.797.550.000,00	APBKam/APBD/APBN/Swadaya/Perhubungan/DAMKAR/CDR/BOB
Bidang Pembinaan Masyarakat	Belanja barang dan jasa	Rp 446.400.000,00	APBKam
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Opeasional	Rp 124.000.000,00	APBKam/APBD/APBN
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pelayanan Dasar Pendidikan	Rp 4.375.850.000,00	APBKam/APBD/APBN
Bidang Pertanian	Pengembangan Usaha pertanian, ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	Rp 4.968.310.000,00	APBKam/APBD/APBN/Disbun/Dinas Pasar/Dinas Koperasi
Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp 11.060.000.000,00	DLHK/DisPerkeb/BLH
Pembinaan Masyarakat	Pembinaan Kelembagaan Kampung , Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian	Rp 427.700.000,00	APBKam/APBD/Dispora/APBN/Swadaya
Bidang Kesehatan	Pelayanan dasar Kesehatan	Rp 429.700.000,00	APBKam/APBD/APBN/DinKes
Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Kampung dan Keterampilan	Rp 189.000.000,00	APBKam/APBD/APBN
Jumlah Total		Rp 144.818.510.000,00	

